

**PERANAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM PEMBANGUNAN DESA
DI KELURAHAN SONGGUMINASA KECAMATAN
SOMBA OPU DAERAH TINGKAT II
GOWA**



S K R I P S I

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Lengkap pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas "45"
Ujung Pandang

O L E H

ROHANI

Nomor Stb/Nirm : 4586020168/871133207

J u r u s a n ; Administrasi Negara

1990/1991

I

PERANAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM PEMBANGUNAN DESA
DI KELURAHAN SUNGGUMINASA KECAMATAN
SOMBA OPU DAERAH TINGKAT II
GOWA



SKRIPSI

SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA LENGKAP PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS " 45 "
UJUNG PANDANG

OLEH

R O H A N I

NOMOR P. TA/NIRN : 4586020168/871133207

KELOMPOK : ADMINISTRASI NEGARA

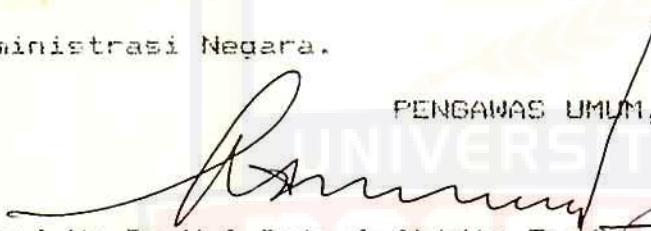
1990 / 1991

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari / tanggal : Jumat, 31 Mei 1991
 Skripsi atas nama : R O H A N I
 Nomor Stambul /Nirm : 4586020168/871133207

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas " 45 " Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada jurusan Ilmu Administrasi Negara.

PENGAWAS UMUM,




(Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid)

(Prof. Drs. H. Sadly AD, MPA)

Rektor Universitas " 45 "

Dekan Fisipol Unhas

PANITIA UJIAN



(Drs. H. Moh Thala)

P e t u a



(Drs. Guntur Karnoeni)

Sekretaris

(Prof. Dr. H. M. Syukur Abdullah)

Anggota

TIM PENGUJI

1. Prof. Drs. H. Sadly AD, MPA
2. Drs. Lanefie, M. Ed. Adm
3. Drs. H. Mohammad Thala
4. Drs. H. P. S Rahim, MS



HALAMAN PENGESAHAN

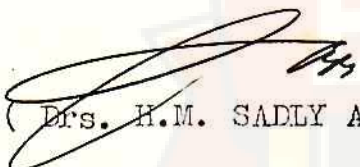
Judul Skripsi : PERAHAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM-
PEMBANGUNAN DESA DI KELURAHAN -
SUNGGUMINASA KECAMATAN SOMBA OPU
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA

Nama Mahasiswa : R O H A N I
Nomor Stb / Nirm : 4586020168 / 871133207

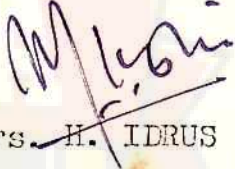
Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



(Drs. H.M. SALLY AD.MPA)



(Drs. H. IDRUS NURDIH)

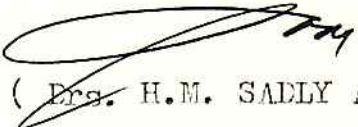
Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
Universitas " 45 "

Ketua jurusan Ilmu
Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik



(Drs. H.M. THALA)



(Drs. H.M. SALLY AD.MPA)

Tanggal Pengesahan :

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadiran Allah Rabbul Alamin, Karena berkah dan hidayahnyalah sehingga skripsi ini dapat selesai sebagai tugas dalam penyelesaian study pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas " 45 " Ujung Pandang.

Atas selesainya penyusunan skripsi ini bagi penulis adalah merupakan kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri, namun secara sadar penulis mengakui didalam penyusunannya mengalami berbagai hambatan dan rintangan yang dihadapi, dan berkat doa, ketekunan dan kerja keras penulis, Alhamdulillah kesemuanya itu dapat teratasi.

Namun tak dapat pula dipungkiri bahwa dalam bentuk penyusunannya jauh mendekati kesempurnaan karena keterbatasan dan kemampuan serta kurangnya bahan yang dimiliki penulis.

Oleh karena itu pada tempat ini wajarlah kiranya penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan serta rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam rangka penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Ayahanda Haji DJAJA dan Ibunda tercinta Haji HAMINA, berkat doa dan pengorbanannya hingga selesainya study penulis.
2. Bapak Rektor Universitas " 45 " Ujung Pandang.
3. Bapak Drs. H. M. THALA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik.

4. Bapak Drs. H. M. SADLY AD.MPA selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H. IDRUS NURDIN selaku Pembimbing II serta Bapak Drs. MUCHLIS sebagai Pembimbing III penulis, atas segala ketabahan dan kerelaan hatinya memberikan bimbingan serta petunjuk kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Kepala Kelurahan Sungguminasa beserta aparatnya di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Daerah Tingkat II Gowa.
6. Kepada kedua saudara penulis yakni H. ARIFIN dan M. TAHIR S atas segala bantuannya.
7. Kepada Mas FANDOLI, atas segala bimbingan, dorongan serta perhatiannya mulai dari penyusunan sampai terselesainya skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Kesemuanya itu penulis hanya mampu pasrahkan kepada yang Maha Pengasih mudah-mudahan akan mendapatkan imbalan darinya dan semoga pula skripsi ini dapat bermanfaat pada semua pihak, dan khususnya bagi diri penulis untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Ujung Pandang,

Hormat Penulis

(R O H A N I)

Stb : 4586020169

DAFTAR TABEL

No. TABEL	JUDUL	HALAMAN
I	Keadaan Luas Kelurahan Sungguminasa Dalam Tiap Lingkungan.	38
II	Jumlah Lingkungan DRW dan ORT di Kelurahan Sungguminasa.	39
III	Tata Guna Tanah di Kelurahan Sungguminasa 1990.	40
IV	Keadaan Jumlah Penduduk Tiap Lingkungan Pada Tahun 1990.	42
V	Keadaan Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kelurahan Sungguminasa.	44
VI	Keadaan Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian di Kelurahan Sungguminasa.	46
VII	Jenis Ternak di Kelurahan Sungguminasa.	47
VIII	Keadaan Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 1990.	48
IX	Jumlah dan Jenis Sarana Ibadah yang Ada di Kelurahan Sungguminasa Tahun 1990.	50
X	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kelurahan Sungguminasa 1990.	51
XI	Jumlah Sarana Kesehatan di Kelurahan Sungguminasa 1990	52

No. TABEL	JUDUL	HALAMAN
XII	Jumlah Akseptor KB dan Pasangan Usia Subur Kelurahan Sungguminasa 1990	53
XIII	Jumlah Sarana Angkutan/Transportasi Kelurahan Sungguminasa Tahun 1990.	54
XIV	Jumlah Sarana Komunikasi di Kelurahan Sungguminas 1990.	55
XV	Analisa Tentang Keterlibatan Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Kelurahan Sungguminasa.	58
XVI	Latar Belakang Pendidikan Responden Pemimpin Informal.	60
XVII	Analisa Tentang Kemampuan Para Pemimpin Informal Untuk Menyumbang Dalam Pembangunan Desa.	62

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENERIMAAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR ISI	VI
RIWAYAT HIDUP	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Kerangka Pemikiran	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	9
Bab II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERANAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM PEMBANGUNAN	12
A. Peranan Pemimpin Informal	12
1. Pengertian Pemimpin, Kepemimpinan dan Pemimpin Informal	12
2. Kriteria dan Tipe Kepemimpinan	16
a. Kriteria Kepemimpinan	16
b. Tipe Kepemimpinan	17
3. Sifat-sifat dan ciri-ciri Pemimpin Informal	18
a. Sifat Pemimpin Informal	18

b. Ciri-ciri Pemimpin Informal	19
4. Faktor-faktor munculnya Pemimpin Informal	19
5. Azas-azas dan Fungsi Pemimpin	22
B. Pembangunan Desa	24
1. Pengertian Pembangunan, Desa dan Pembangunan Desa	25
2. Proses Kegiatan Pembangunan Desa ..	27
3. Aspek-aspek Pembangunan Desa	28
4. Sasaran Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan	30

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

KELURAHAN SUNGGUMINASA	36
A. Selayang Pandang Kelurahan Sungguminasa	36
B. Geografi	37
1. Wilayah Pemerintahan	38
2. Keadaan Tanahnya	39
3. Keadaan Iklimnya	41
C. Demografi	41
1. Keadaan dan Jumlah Penduduk Kelurahan Sungguminasa	41
2. Komposisi Penduduk menurut umur .	43
3. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian	45
4. Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan	47
5. Keadaan Penduduk Menurut Agama .	49

6. Kesehatan	50
7. Keluarga Berencana	53
8. Sarana Angkutan/Transportasi	54
9. Sarana Komunikasi	54
10. Sosial Ekonomi Masyarakat	55
BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN	57
A. Keterlibatan Pemimpin Informal dalam Pembangunan Desa	57
B. Pemimpin Informal dan Kebijakan Pemerintah	63
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pe - laksanaan Pembangunan Desa Di Kelura- han Sungguminasa	67
1. Faktor Pendukung	67
2. Faktor Penghambat	68
D. Langkah-langkah Dalam Mengatasi Ham - batan	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

RINAYAT HIDUP

N a m a : R O H A N I
 Tempat/Tgl Lahir : Sungguminasa, 6 Juni 1967
 Jumlah bersaudara : 3 (Tiga) Orang
 A n a k : Ketiga
 S t a t u s : Belum Kawin
 A g a m a : I s l a m
 Pekerjaan : Mahasiswa
 A l a m a t : Jln. Malino No. 23 Sungguminasa

Riwayat Pendidikan

1. SD NEGERI VI BONTOKAMASE LULUS TAHUN 1980 (BERIJAZAH)
2. SMP NEGERI I SUNGGUMINASA LULUS TAHUN 1983 (BERIJAZAH)
3. SMA NEGERI 159 SUNGGUMINASA LULUS TAHUN 1986 (BERIJAZAH)
4. UNIVERSITAS 45 UJUNG PANDANG FAK SOSPOL LULUS TAHUN 1991

Nama Ayah : H. DJAJA
 Tempat/Tgl Lahir : GOWA, 1921/ 70 TAHUN
 Pekerjaan : MIRASWASTA
 A l a m a t : Jln. MALINO No. 23. SUNGGUMINASA
 Nama Ibu : H. HAMINA
 Tempat/Tgl Lahir : GOWA, 1927/ 64 TAHUN
 Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
 A l a m a t : Jln. MALINO No. 23. SUNGGUMINASA

Demikianlah sekilas riwayat hidup penulis

Yang membuat

(R O H A N I)

ABSTRAKSI

Sebagaimana judul skripsi ini adalah Peranan Pemimpin Informal Dalam Pembangunan Desa di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu Daerah Tingkat II Gowa, dimana bertujuan untuk mengetahui tiga permasalahan yaitu Pertama untuk mendapatkan data yang jelas tentang peranan pemimpin Informal dalam Pembangunan Desa di Kelurahan Sungguminasa, kedua untuk mengetahui bagaimana pemerintah dalam mengantisipasi para Pemimpin Informal, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam Pembangunan Desa, ketiga untuk mendapatkan data yang jelas terhadap faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat terhadap pelaksanaan pembangunan desa di Kelurahan Sungguminasa.

Kemudian metode yang digunakan adalah metode survey yaitu dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah individu dan tipe penelitian adalah Deskriptif yaitu suatu Penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Peranan Pemimpin Informal Dalam Pembangunan Desa. Selanjutnya teknik pengumpulan data dipergunakan dengan melalui Field research (penelitian lapangan) dan adapun teknik penarikan sampel adalah Purposive Sampling yaitu dengan pertimbangan khusus dan tertentu yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat yang bisa mewakili yang lainnya, dengan menggunakan teknik wawancara mengadakan tanya jawab dengan masalah yang akan dibahas dan kuesioner yaitu dengan membagikan daftar pertanyaan.

Selanjutnya tentang kesimpulan dalam hasil penelitian yang telah penulis lakukan adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa khususnya di Kelurahan Sungguminasa sangat besar manfaatnya dalam menunjang proses pelaksanaan pembangunan mengingat para pemimpin informal dapat menangkap aspirasi serta kehendak warga masyarakat. Partisipasi masyarakat baik materil maupun spiritual sangat besar manfaatnya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan adanya kerja sama yang berkaitan antara pihak pemerintah dengan pemimpin informal dalam pembangunan desa namun disadari bahwa masih banyak masalah hambatan dalam pelaksanaan pembangunan, tetapi hal ini secara berangsur-angsur dapat teratasi yang disebabkan karena beberapa faktor pendukung diantaranya kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Dan akhirnya terungkap bahwa pemimpin informal dalam pembangunan desa sangat menentukan keberhasilannya, dan ini dapat terkabulkan apabila para pemimpin memiliki kemampuan yang baik dan tinggi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.

Kepemimpinan adalah pangkal utama dan pertama penyebab dari pada kegiatan, proses atau kesediaan untuk merubah pandangan atau sikap dari kelompok orang-orang baik dalam hubungan formal maupun informal.

Dengan mementingkan tindak-tanduk perbuatan, maka pemimpin harus memiliki kepribadian dan panutan sehingga akan membuat sekelompok orang-orang mau melakukan apa yang dikehendaki.

Pada diri pribadi seorang dapat disebut pemimpin yang berhasil apabila dengan kepribadiannya dapat membuat dan memancarkan suatu pengaruh terhadap kelompok orang tertentu.

Didalam suatu organisasi formal maka kepemimpinan itu adalah merupakan suatu proses yang terus menerus dan yang membuat semua anggota organisasi bergairah dan berdaya upaya untuk memahami dan mencapai tujuan yang dibutuhkan oleh pemimpin. Untuk itu peranan pemimpin yang dominan itu tampak lebih jelas apabila dikaitkan dengan keharusan berinteraksi dengan lingkungan yang selalu berubah dan berkembang, oleh karenanya perkembangan tersebut bukan hanya harus diantisipasi, melainkan juga harus dimanfaatkan, untuk itu unsur dari pimpinanlah yang diharapkan mempunyai kelebihan dan mampu melihat implikasi dan ranifikasi dari perkembangan bagi kehidupan organisasi, karena efektivitas

2
kepemimpinanlah dari seseorang juga sangat ditentukan oleh kemampuannya mempengaruhi akan sifat serta kondisi yang terdapat diluar organisasi, serta mempunyai dampak bagi jalannya roda organisasi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan khususnya pembangunan fisik yang dilaksanakan di pedesaan, dimana pembangunan dewasa ini merupakan suatu upaya yang terus menerus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan dalam berbagai aspek yang berakumulasi didalamnya salah satu diantaranya yaitu aspek manusia, baik sebagai obyek maupun sebagai subyek dari pada pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut maka partisipasi masyarakat desa khususnya sangat diharapkan untuk pembangunan tersebut sebab tanpa partisipasi mustahil keberhasilannya akan dapat tercapai, maka proses perkembangannya sangat dibutuhkan suatu pola kepemimpinan yang berkualitas yaitu pemimpin yang memiliki keterampilan, kecakapan bersih dan berwibawa dalam mengarahkan pembangunan dalam hal ini khususnya pembangunan fisik di pedesaan.

Pemimpin merupakan salah satu modal utama dalam rangka menunjang jalannya roda pembangunan, begitu pula merupakan salah satu modal utama atau faktor utama dari sukses atau tidaknya pembangunan yang sementara digalakkan.

Peranan pemimpin dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk dapat memberi serta sekaligus mengarahkan seluruh warga kelompok yang harus dihadapinya agar tercapai target yang ditetapkan seluruhnya.

Serangkaian asumsi tersebut, maka penulis merasa terdorong untuk melihat dampaknya dan mengangkat suatu judul :

" PERANAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KELURAHAN SUNGGUMINASA KECAMATAN SOMBA OPU DAERAH TINGKAT II GOWA ".

B. Perumusan masalah.

Sebagaimana kita sadari bahwa peranan Pemimpin Informal dalam kegiatan pembangunan desa tidak boleh dikesampingkan yang mana pembangunan tersebut merupakan dua bagian yaitu pembangunan fisik dan non fisik, namun dalam hal ini penulis memfokuskan pada pembangunan fisik di Kelurahan Sungguminasa antara lain :

- Pembangunan beberapa kantor lingkungan.
- Pembangunan mesjid.
- Pembuatan perbaikan jalan.
- Pembuatan sarana pendidikan.
- Perbaikan selokan dan lain-lain.

Adapun yang menjadi obyek penelitian pada pembangunan fisik ini adalah pembuatan jalan lingkungan Sungguminasa, tetapi kadangkala kita bingung untuk membedakan yang mana seharusnya merupakan kegiatan pemimpin formal (pemerintah)

dan kegiatan Pemimpin Informal itu sendiri dan sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis membatasi masalah yang harus diteliti.

Adapun pembatasan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimanakah peranan Pemimpin Informal dalam melaksanakan pembangunan fisik di Kelurahan Sungguminasa.
2. Bagaimanakah kebijaksanaan pemerintah mengantisipasi para Pemimpin Informal untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan fisik di Kelurahan Sungguminasa.
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan fisik di Kelurahan Sungguminasa.

C. Kerangka Pemikiran.

Bertitik tolak dari topik penulisan ini, yaitu peranan Pemimpin Informal Dalam Pembangunan Desa di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Daerah Tingkat II Gowa, dengan demikian keikutsertaan dan keterlibatan para Pemimpin Informal di Kelurahan Sungguminasa merupakan dukungan bagi kelancaran pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini khususnya pembangunan fisik.

Dengan kemampuannya mempengaruhi lapisan masyarakat untuk berbuat sesuatu tentunya diharapkan terwujudnya suatu keberhasilan pembangunan desa yang merupakan program dari pemerintah yang telah dicanangkan.

Berbicara tentang Pemimpin Informal, berarti kita akan mempermasalahkan sesuatu yang tidak resmi, namun

5
dirasakan sangat besar peranannya, karena dengan hadirnya Pemimpin Informal tentulah diharapkan oleh pemerintah. Sebagaimana dalam buku Pemimpin dan Kepemimpinan oleh Karini dan Kartono menjelaskan bahwa :

" Pemimpin Informal adalah seorang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi spikis dan prilaku suatu kelompok atau masyarakat ".
(1)

Dengan menyimak pengertian diatas, maka dapatlah kita mengerti bahwa Pemimpin Informal itu tidak dilandasi oleh suatu ketentuan tertulis, kecuali hanya merupakan kebiasaan yang menjadi panutan dalam masyarakat, namun harus diakui bahwa keberadaanya sangat dibutuhkan dalam masyarakat, hal ini disebabkan karena kemampuannya untuk mempengaruhi serta memberi dorongan kepada seseorang atau kelompok masyarakat.

Oleh karena itu sepantasnyalah Pemimpin Informal untuk senantiasa memberikan perhatian khusus terhadap para Pemimpin Informal yang ada di Kelurahan Sungguminasa, dengan tujuan agar mereka itu mau berpartisipasi dan ikut serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Selanjutnya penulis membahas masalah pembangunan desa sebagaimana judul tersebut adalah Peranan Pemimpin Informal Dalam Pembangunan Desa. Dan pembangunan yang sementara dilaksanakan di kelurahan sungguminasa adalah pembangunan fisik dan non fisik, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan, namun dalam hal ini penulis memfokuskan pada pembangunan fisik saja, dengan demikian

maka hakekat dari pembangunan itu merupakan suatu usaha dan perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu.

Dalam pola gerak oprasional pembangunan (Surat keputusan menteri dalam negeri No. 42 tahun 1969) ditegaskan bahwa :

" Pembangunan desa adalah usaha dari masyarakat pada unit Pemerintah yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus sistimatis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan negara sebagai usaha yang menyeluruh ".(2)

Jelaslah maka pembangunan desa merupakan sutu proses perubahan yang tidak henti-hentinya dilaksanakan dengan arah kemajuan dan perbaikan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan yang diharapkan. Bertitik tolak dari penegasan tersebut diatas, maka betapa pentingnya pengembangan pembangunan desa untuk lebih lagi ditingkatkan, sebab desa merupakan suatu wadah yang terendah serta fondasi atau dasar dari semua bentuk pembangunan pada umumnya, karena dalam pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam serta pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan suatu keterampilan dan prakarsa dari masyarakat dengan meningkatkan bimbingan dan bantuan dari aparat pemerintah, namun untuk keberhasilan suatu kebijaksanaan pembangunan desa tentunya banyak tergantung juga pada keterlibatan semua pihak.

D. Tujuan dan kegunaan penelitian.

Didalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan yaitu mengenai Peranan Pemimpin Informal Dalam Pembangunan Desa di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Daerah Tingkat II Gowa.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang Peranan Pemimpin Informal Dalam Pembangunan Desa di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Daerah Tingkat II Gowa.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana pihak pemerintah dalam mengantisipasi peranan Pemimpin Informal dalam pembangunan desa.
3. Untuk mengetahui masalah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan desa di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Daerah Tingkat II Gowa.

Kemudian hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Bagi masyarakat untuk dapat menambah motivasi dalam berpartisipasi agar dapat lebih meningkatkan tanggung jawabnya terhadap keberhasilan pembangunan di pedesaan.
2. Bagi pemerintah untuk dapat memberikan input-input dan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam mengemban tugasnya.
3. Bagi diri penulis untuk menambah luas wawasan berfikir dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Metode penelitian.

Sebelum penulis melangkah kepembahasan selanjutnya maka terlebih dahulu penulis memaparkan pengertian dari methodologi, dimana menurut DR. SP.SIAGIAN MPA adalah sebagai berikut :

" Metode adalah suatu cara untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan, tercapainya dipengaruhi oleh cara kerja yang baik akan melancarkan jalannya pekerjaan ". (3)

Oleh karena itu telah diketahui bahwa dalam meneliti dan menelaah suatu permasalahan sangat diperlukan oleh permasalahan yang sangat erat hubungannya dengan pokok pembahasan ini, dan dengan demikian penulis mempergunakan suatu metode sebagai berikut :

1. Dasar penelitian adalah survey yaitu dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah individu (responden) karena luasnya daerah penelitian, sehingga penelitian hanya dilakukan untuk mendapatkan data yang ada hubungannya dengan masalah.
2. Tipe penelitian adalah Deskriptip yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranan Pemimpin Informal Dalam Pembangunan Desa di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Daerah Tingkat II Gowa.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari :
Penelitian lapangan (Field Research) adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis yang dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu bahan dengan menggunakan teknik.

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan masalah yang akan dibahas.
2. Kuesioner, yaitu dengan membandingkan daftar pertanyaan.

Adapun yang menjadi nara sumber dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah, dengan tehnik penentuan **PURPOSIVE SAMPLING** yaitu pertimbangan-pertimbangan khusus dan tertentu yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat yang dapat mewakili yang lainnya.

Responden tersebut berjumlah 92 orang yang terdiri dari Tokoh Agama 20 orang, Tokoh Pendidikan 51 orang, Tokoh Usaha Tani 14 orang dan Tokoh Adat 7 orang, dari semua responden ini penulis akan mendapatkan data dan informasi mengenai peranannya dalam pembangunan Desa di Kelurahan Sungguminasa, selain itu juga penulis mewawancarai dari aparat pemerintah Kelurahan Sungguminasa tentang bagaimana kebijaksanaannya dalam mengantisipasi para Pemimpin Informal di Kelurahan Sungguminasa antara lain Kepala Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Pengurus LKMD.

F. Sistematika Pembahasan.

Skripsi yang sederhana ini terdiri dari lima bab yang dengan perinciannya sebagai berikut :

Bab Pertama : Merupakan bab pendahuluan yang akan mengantar untuk memahami apa yang tersajikan dalam pembahasan skripsi ini yang dalam sub babnya di kemukakan

tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Membahas tentang tinjauan teoritis tentang peranan pemimpin informal dalam pembangunan desa, yang dalam sub babnya diuraikan tentang pengertian pemimpin, kepemimpinan dan Pemimpin Informal, kriteria dan tipe kepemimpinan, sifat-sifat dan ciri-ciri Pemimpin Informal, kemudian faktor - faktor munculnya Pemimpin Informal, asas-asas dan fungsi pemimpin, menyusul uraian tentang masalah pembangunan desa yang dimulai dengan pengertian pembangunan, desa serta pembangunan desa dan aspek-aspek pembangunan desa serta sasaran pelaksanaan pembangunan desa.

Bab Ketiga : Memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian Kelurahan Sungguminasa yang mengemukakan tentang Selayang pandang Kelurahan Sungguminasa, keadaan Geografi, keadaan Demografi serta keadaan Sosial ekonomi Kelurahan Sungguminasa.

Bab Keempat : Merupakan bab analisa yang menelaah

tentang :

- Keterlibatan Pemimpin Informal dalam pembangunan desa.
- Kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi Pemimpin Informal.
- Faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan desa.
- Langkah-langkah dalam mengatasi hambatan.

Bab kelima : Sebagai bab penutup yang akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian tersebut dan dilengkapi dengan beberapa saran-saran yang dianggap dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERANAN
PEMIMPIN INFORMAL DALAM PEMBANGUNAN DESA

A. Peranan Pemimpin Informal.

Peranan seseorang pemimpin dalam suatu kelompok atau organisasi apapun namanya sangat didambakan dan merupakan salah satu keharusan baginya untuk dinampakan atau direalisasikan dalam mencapai tujuan kelompok yang diinginkan, olehnya itu pemimpin diharapkan sebagai pencipta dalam arti bahwa dia harus mampu mencetuskan suatu pikiran atau ide baru, dan sebagai perencana yakni harus mampu membuat rencana yang tersusun baik menurut fakta yang obyektif tentang masalah serta dia harus mampu sebagai wakil dari kelompoknya yaitu bahwa dia harus senantiasa mengingat atau menyadari bahwa segala kekurangan dan kelebihan, baik burunya tindakan yang diperbuat diluar kelompok dan dapat mencerminkan kelompok yang dipimpinnya, kemudian yang paling penting adalah dia harus berperan sebagai orang ahli yang dimaksudnya, harus mampu dan menguasai segala permasalahan yang ada dalam suatu organisasi atau kelompok yang dipimpinnya.

1. Pengertian Pemimpin, Kepemimpinan dan Pemimpin Informal.

Berbicara mengenai konsep dari pada pemimpin dan kepemimpinan maka akan dijelaskan secara terperinci yaitu secara Etimologi

Diungkapkan oleh seorang ahli dalam ilmu pemimpin dan

Kepemimpinan yaitu pendapat dari Drs. S.PAMUJI MPA yang mengungkapkan sebagai berikut :

Istilah kepemimpinan berasal dari kata dasar " pimpin " yang artinya bimbing atau tuntun dan dari kata pimpin terlintas kata kerja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda " Pemimpin " yaitu orang yang berfungsi memimpin, orang yang membimbing atau menuntun.

Dari pengertian kata dasar tersebut, maka perkataan pemimpin banyak ragam pengertian, unsur serta definisi begitu pula halnya dari kalangan para ahli, mereka juga memberikan suatu pengertian yang berbeda-beda dan dari sekian banyak para ahli tersebut salah satu diantaranya menurut Dra. KARTINI KARTONO sebagai berikut :

" Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khusus dalam melakukan kegiatan itu, sehingga dia mampu mempengaruhi terhadap kemampuan orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan ". (4).

Dengan melihat dan mengerti tentang definisi tersebut diatas maka dalam hal ini penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa seorang pemimpin itu seharusnya memiliki beberapa kelebihan dan kecakapan khusus, tanpa pengakuan secara resmi untuk mengarahkan, membimbing serta menuntun bawahannya, sehingga dia dapat menggerakkan bawahan tersebut kearah pencapaian tujuan yang dikehendaki bersama.

Setelah kita mengetahui pemimpin, maka untuk mengaplikasikan kehendaknya terhadap bawahannya untuk dilaksanakan, seorang pemimpin harus memiliki suatu

kemampuan untuk mempengaruhi bawahannya yang disebut kepemimpinan.

Beberapa ahli telah mengemukakan tentang hal tersebut, dan diantaranya adalah ORDWAY TEAD dalam bukunya " The art of leadership " mengatakan bahwa :

" Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar haknya sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan ".(5)

Sedangkan menurut HOWARD H. HOYT dalam bukunya " Aspect modern Public Administration " bahwa :

" Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia, kemampuan untuk membimbing orang ".(6)

Kemudian lain halnya dengan pendapat Prof. KIMBALL YOUNG beliau mengatakan bahwa :

" Kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu, berdasarkan akseptansi/penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus ". (7)

Dengan melihat tentang definisi pemimpin dan kepemimpinan diatas dapatlah disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu konsep manajemen didalam kehidupan satu kelompok. Kepemimpinan merupakan titik sentral dinamisator terhadap seluruh proses kegiatan organisasi baik organisasi kecil maupun organisasi besar, sehingga kepemimpinan mempunyai peranan sentral dalam menentukan dinamikanya, sumber-sumber yang ada kaitannya dengan segala macam aktifitas organisasi tersebut.

Kepemimpinan merupakan salah satu motor penggerak



berhasil tidaknya suatu organisasi didalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Serangkaian dengan pembahasan dalam tulisan bahwa kepemimpinan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pembinaan dan pengarahan masyarakat yang ada di pedesaan yaitu bagaimana cara menggerakkan kelompok masyarakat tersebut agar dapat tercipta suatu suasana dimana masyarakat dapat berperan dalam rangka mencapai tujuan secara efisien/ efektif dan berdaya guna serta berhasil guna.

Didalam suatu kelompok masyarakat biasanya ada orang tertentu yang menjadi bertanya dan tempat meminta nasehat dari pada anggota masyarakat lainnya. Mengenai urusan-urusan tertentu, mereka ini seringkali memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, untuk bertindak dalam teknik dan cara-cara tertentu sehingga masyarakat hanya dapat terpikat pengaruh tersebut tumbuh bukan karena kekuatan birokrasi formal melainkan karena adanya kemampuan dan hubungan pribadi yang kuat dengan anggota masyarakat.

Orang-orang yang mempunyai pengaruh tersebut biasanya disebut Tokoh Masyarakat, Pemuka, yang diistilahkan dengan Pemimpi Informal.

Pemimpin Informal yang dimaksudkan diatas adalah kepemimpinan seseorang yang tidak mempunyai pengangkatan secara resmi dari orang tertentu, Pemimpin Informal biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dari anggota

masyarakat lainnya, sehingga dengan kelebihan tersebut mereka dapat mempengaruhi anggota masyarakat, hal ini didukung oleh pendapat dr. M.KARJADI dalam bukunya

" Kepemimpinan " (Leadership) yaitu sebagai berikut :

" Pemimpin Informal, kepemimpinan ini tidak mempunyai dasar pengangkatan resmi, tidak nyata terlihat gambar bagan, pemimpin ini dengan spontan diterima baik oleh para anak buahnya ". (8)

Oleh karena pemimpin informal memancarkan daya atau sifat-sifat kepemimpinan yang sungguh-sungguh.

Itulah ulasan yang memperjelas tentang hakekat yang sebenarnya mengenai Pemimpin Informal itu, yaitu mereka betul-betul tidak memiliki suatu pengangkatan atau pengesahan secara resmi oleh pihak-pihak yang berwenang.

2. Kriteria dan Tipe Kepemimpinan.

a. Kriteria kepemimpinan.

Masalah kriteria kepemimpinan merupakan salah satu hal pokok yang seharusnya diketahui, sebab dengan mengetahui hal tersebut maka secara tidal langsung kita dapat mengetahui tentang siapa dan bagaimana kepemimpinan dalam suatu wadah atau instansi tertentu dan olehnya berikut ini MAX WEBER akan mengemukakan tiga kriteria kepemimpinan yaitu antara lain :

1. Tradisional.

Yang tuntutan keabsahannya didasarkan atas suatu kepercayaan yang tidak ada (Stabilished) pada kesenian tradisi yang amat kuno.

2. Rasional atau berdasarkan hukum (legal).

Yang didasarkan atas kepercayaan terhadap legalitas peraturan dan hak bagi mereka yang memegang kedudukannya yang berkuasa berdasarkan peraturan-peraturan untuk mengeluarkan perintah-perintah.

3. Kharismatik atas pribadi.

Yang didapatkan dari pengabdian diri terhadap kesucian, kepahlawanan tertentu, atau sifat yang patut di contoh dari seseorang dan corak tatertib yang diperlihatkan olehnya.

Maka dengan melihat ketiga kriteria tersebut diatas nampaklah bagi kita bahwa betapa pentingnya bagi pemimpin dalam memperhatikan kondisi, aturan-aturan serta situasi ketauladanan yang patut dicontoh oleh para pengikutnya, dan akhirnya bahwa menurut MAX WEBER kepemimpinan kharismatik merupakan perubahan kerah yang lebih baik (Pembangunan dalam berbagai segi kehidupan).

b. Tipe kepemimpinan.

Menurut LEVIN (1949) sebagai ahli filsafat dan teori sosialis bahwa kepemimpinan itu mempunyai beberapa tipe yang antara lain sebagai berikut :

1. Pemimpin Kharismatik, sangat membantu kelompok dalam hal pendapat, dukungan dalam pencapaian suatu tujuan.
2. Pemimpin Organisasional, menitik beratkan kepada tindakan yang efektif dan cenderung mendorong anggota kelompok.
3. Pemimpin Intelektual, biasanya kurang terampil dalam

menarik simpatik anggota kelompok.

4. Pemimpin Informal, condong ingin menyesuaikan gaya, penampilan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok.

Dari uraian diatas dapat memberikan gambaran bahwa pemimpin dalam kelompok masyarakat terdiri dari beberapa kriteria dan tipe-tipe yang pada dasarnya kriteria dan tipe kepemimpinan itu memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana seharusnya kepemimpinan yang selayaknya dilakukan dalam suatu daerah dan gambaran karakteristik serta orientasi fungsional masyarakat, sebab hal ini sangat tergantung pada tuntutan situasi serta kondisi lingkungan sosial untuk meningkatkan peranannya atau aktivitasnya untuk berkarya dalam berbagai bidang pembangunan.

3. Sifat-sifat dan ciri-ciri Pemimpin Informal.

a. Sifat Pemimpin Informal.

Menurut N. KARJADI bahwa sifat Pemimpin Informal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan memikat hati orang lain.
2. Dapat menempatkan dirinya tepat diantara anak buahnya dengan hubungan yang serasi.
3. Mampu menguasai organisasi dan tujuannya dengan baik.
4. Memiliki teknik-teknik kepemimpinan yang tepat.
5. Memiliki kelebihan-kelebihan daya fisik dan mental serta daya pikir atas mereka.
6. Dan lain-lainnya.

b. Ciri-ciri pemimpin informal.

Pemimpin Informal adalah suatu tipologi kepemimpinan yang memiliki tanda atau ciri tersendiri. Adapun ciri tersebut diungkapkan oleh Dra. KARTINI KARTONO dalam bukunya pemimpin dan kepemimpinan yaitu sebagai berikut :

1. Tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai pemimpin.
2. Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya dan mengakuinya sebagai pemimpin, status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima dirinya.
3. Dia tidak mendapatkan dukungan/ backing dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinan.
4. Biasanya tidak mendapatkan imbalan jasa, atau imbalan jasa itu diberikan secara sukarela.
5. Tidak dapat dimutasikan, dan tidak pernah mencapai promosi, dan tidak memiliki absen, dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu.
6. Apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum, hanya saja respek orang terhadap dirinya jadi berkurang, tidak diakui atau ditinggalkan oleh masyarakat.

4. Faktor-faktor munculnya Pemimpin Informal.

Karena keberadaannya Pemimpin Informal yang biasanya muncul banyak di pedesaan tentunya dalam hal ini tidak muncul begitu saja tanpa ada yang menyebabkannya, sehingga pemimpin informal itu muncul atau ada dalam suatu kehidupan kemasyarakatan. Kepemimpinan muncul bersama-sama adanya peradaban manusia, yaitu sejak nenek moyang manusia itu berkumpul bersama, sejak itulah terjadi kerja sama antar manusia dan unsur-unsur kepemimpinan, dan pada saat itulah yang ditunjuk sebagai pemimpin ialah orang-orang yang paling kuat, paling cerdas dan paling berani. Untuk itu ada tiga teori yang menonjol dalam menjelaskan faktor kemunculan Pemimpin Informal yakni :

a. Teori Genetis menyatakan sebagai berikut :

- Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakatnya yang luar biasa sejak lahirnya.
- Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin, dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga.
- Secara filosofi, teori tersebut menganut pandangan yang deterministik dan fatalistis.

b. Teori Sosial (lawan teori genetis) menyatakan sebagai berikut :

- Pemimpin-pemimpin itu harus disiapkan dan dibentuk, tidak dilahirkan saja.
- Setiap orang bisa menjadi pemimpin, melalui usaha penyiapan dan pendidikan.

c. Teori Ekologis dan Synthetis (muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut lebih dahulu) menyatakan sebagai berikut :

- Seorang akan sukses menjadi pemimpin, bila sejak dari lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, dan juga sesuai dengan tuntunan lingkungan (ekologisnya).

Dengan melihat ulasan tersebut, maka dalam hal ini terpilihnya seseorang sebagai Pemimpin Informal dalam suatu kelompok adalah tidak mudah sebab ada beberapa faktor yang sulit dimiliki terhadap semua orang, khususnya yang menyangkut masalah-masalah kelebihan dalam kepemimpinannya baru kemudian bisa ditunjuk sebagai Pemimpin Informal dalam suatu kelompok masyarakat.

Oleh karena itu sepantasnyalah Pemimpin Formal untuk senantiasa memberikan perhatian khusus terhadap para Pemimpin Informal yang ada di daerahnya, dengan tujuan agar mereka itu mau berpartisipasi dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan desa di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Daerah Tingkat II Gowa.

Mereka yang digolongkan dalam Pemimpin Informal antara lain adalah :

- Tokoh masyarakat di bidang Agama.
- Tokoh masyarakat dibidang Pendidikan.
- Tokoh masyarakat dibidang Pertanian.

- Tokoh masyarakat dibidang Adat Istiadat.

Keempat golongan ini dalam organisasi kemasyarakatan di pedesaan ikut memegang peranan dan pengaruh dalam berbagai bidang kegiatan.

5. Azas-azas dan Fungsi Pemimpin.

Masyarakat modern dewasa ini butuh berkepentingan dengan pemimpin yang baik yang mampu menuntun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa, karena itu keberhasilan seorang pemimpin dapat dinilai dari produktivitas dan prestasi yang dicapainya juga harus dinilai dari kebaikannya.

Sehubungan dengan kegiatan pembangunan sekarang ini dirasakan perlu adanya pemimpin-pemimpin yang efektif dan baik pekertinya, berkaitan dengan masalah ini berikut penulis menguraikan azas-azas dan fungsi pemimpin.

Kepemimpinan itu hendaknya jangan terlalu banyak dinilai dari segi-segi materiilnya saja, akan tetapi juga harus dipertimbangkan pengaruh dan akibat buruk apa yang mereka timbulkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Sekali lagi dijelaskan bahwa pemimpin itu pada umumnya mereflesikan sifat-sifat dan tujuan dari kelompoknya.

Fungsi kepemimpinan ialah memadu, menuntun, membimbing, membangun, memberi motifasi-motifasi kerja kepada kelompok masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik dan membawa

para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.

Azas-azas kepemimpinan yang baik adalah :

1. Kemanusiaan : Mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan pembimbing manusia oleh manusia untuk mengembangkan potensi dan kemampuan setiap individu.
2. Efesiensi : Efesiensi teknis maupun sosial, berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber materi dan manusia.
3. Kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih merata menuju pada taraf kehidupan yang lebih baik.

Etika profesi pemimpn mengandung kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki satu atau beberapa kelebihan dalam pengetahuan, keterampilan sosial dan atau teknis pengalaman.
2. Dia berkompoten melakukan kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas kepemimpinannya.
3. Mampu bersikap susila dan dewasa sehingga dia selalu bertanggung jawab secara ethis/susila/mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk dan memiliki tanggung jawab sosial.
4. Memiliki kemampuan mengontrol diri yaitu mengontrol emosi, keinginan dan segenap perbuatannya, disesuaikan dengan norma-norma kebaikan.
5. Dikenai sangsi, oleh adanya norma-norma perintah

dan larangan-larangan yang harus ditaati oleh pemimpin demi kesejahteraan hidup bersama.

Sikap moral pemimpin adalah sikap yang bertanggung jawab agar dirinya selalu bertanggung jawab moral, berdasarkan etonomi, yang menuntut agar dirinya selalu bersikap kritis dan realistis. Sikap kritis ini perlu juga ditujukan kepada macam-macam kekuatan, kekuasaan dan otoritas yang terdapat ditengah-tengah masyarakat.

B. Pembangunan Desa.

Realisasi kegiatan pembangunan desa merupakan tanggung jawab oleh semua pihak yakni baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah itu sendiri, dalam hal ini perlu diketahui bahwa dewasa ini pembangunan yang sementara digalakkan bertujuan tak lain adalah untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, demikian pula halnya bahwa pemerintah sangat diharapkan untuk lebih jeli dan cermat untuk mengadakan approach atau pendekatan terhadap masyarakat, khususnya para tokoh masyarakat sehingga mereka dapat diantisipasi untuk turut serta mensukseskan pembangunan disegala bidang dimana dalam hal ini penulis memfokuskan pada pembangunan fisik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pembangunan fisik khususnya di pedesaan, yang paling memegang peranan terhadap keberhasilannya adalah partisipasi masyarakat itu sendiri dimana diaplikasikan dalam bentuk swakarsa dan swasembada, gotong royong baik berupa materiil

maupun spirituil yaitu masyarakat diharapkan partisipasinya mulai sejak dari perumusan rencana sampai kepada perealisasiannya dengan maksud untuk kesejahteraan bersama secara keseluruhan, namun hal tersebut kita semua sudah mengetahuinya, tetapi kesadaran kita semua tidak memadai, maka mustahil semua itu bisa kita raih dengan baik.

1. Pengertian pembangunan, desa dan pembangunan desa.

Ungkapan tentang pembanguna berarti kita tidak boleh terlepas dari pada gelutan berbagai bentuk kegiatan, baik pelaksanaannya secara berkelompok maupun dilakukan secara individu dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu tentunya lebih baik jika dengan sebelumnya.

Berikut ini akan diulas tentang pengertian dari pada kata pembangunan yaitu menurut SONDANG P. SIAGIAN yaitu :

" Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu oknum atau bangsa, negara dan pemerintah modernitas dalam rangka pembinaan bangsa ". (8)

Pendapat tersebut juga diperjelas oleh WILLIARD B. SPALDING, dalam karangannya berjudul " The dynamics of planned change " dikutip seorang ahli yaitu BINTORO mengatakan bahwa :

" Pembangunan merupakan suatu proses secara kontinyu dan terus menerus dari suatu tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih menguntungkan atau lebih baik ". (9)

Dengan menganalisa kedua pengertian tersebut diatas maka pembangunan tak lain adalah suatu perubahan kearah yang lebih baik.

Kemudian dari pada itu yang penting pula diketahui dalam pembahasan ini adalah tentang masalah kata " Desa " sebab salah satu fokusnya adalah tentang pembangunan desa, maka berikut ini akan diketengahkan secara terperinci yaitu :

Perkataan " Desa " itu berasal dari bahasa sangsekerta yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, maka menurut para ahli, dengan ini merupakan suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa untuk menentukan pemerintahan sendiri.

Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa dijelaskan mengenai pengertian desa yaitu :

" Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia ". (10)

Selanjutnya menurut SUTARDJO KARTOHADIKUSUMO (1953 :

2) dinyatakan bahwa :

" Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri ". (11)

Dari pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa desa itu merupakan suatu tingkatan terendah dari semua tingkatan organisasi pemerintah, atau desa adalah suatu wadah terendah bagi masyarakat untuk berkatifitas dalam kegiatan pembangunan disemua aspek.

Adapun pengertian kelurahan menurut undang-undang nomor 5 tahun 1979 adalah sebagai berikut :

" Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat yang tidak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ". (12)

2. Proses Kegiatan Pembanguna Desa.

Bahwa dalam melaksanakan sesuatu kegiatan tentunya tidak langsung begitu saja dilakuka, melainkan harus melalui tahap kegiatan agar lebih mantap, dimana dalam langkah awal harus dilalui dengan suatu perencanaan, dengan tujuan agar supaya didalam bertindak terhadap pelaksanaan pembangunan berbagai kegiatan dapat menjamin keberhasilannya suatu usaha karena suatu rencana adalah suatu keputusan tentang apa yang akan dikerjakan di kemudian hari.

Kemudian untuk merealisasikan suatu perencanaan yang telah disepakati kadangkala suatu rencana itu ditemukan masalah atau problem sehingga biasanya menimbulkan berbagai macam kegagalan terhadap pelaksanaan kegiatan, olehnya itu hal tersebut dapat diatasi dengan jalan diusahakan ide-ide atau input-input, dan seharusnya dikonsultasikan dengan instansi yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan desa yang akan dicanamkan.

Selanjutnya disusun program kerja yang akan merupakan perincian dari pada suatu rencana. Dalam program kerja itu telah ditentukan prioritas kegiatan, sumber pembiayaan, lokasi proyek-proyek yang hendak direalisasikan serta waktu,

prasarana yang diperlukan, jika rencana dan program kerja telah disusun maka tinggalah pelaksanaannya, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengawasan serta evaluasi kegiatan dengan hasil-hasil yang telah dicapai.

3. Aspek-aspek pembangunan desa

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan desa meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat dan terdiri dari berbagai sektor yang paling berkaitan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat desa untuk perlu dihimpun tata cara terpadu baik perencanaan maupun pelaksanaannya, aspek-aspek tersebut meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan serta agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hubungan yang sangat terpadu ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perlu pula diperhatikan aspek manajemen dalam perencanaannya, pelaksanaannya, serta pengawasan dan koordinasi, dalam upaya untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang seoptimal mungkin dalam pembangunan tersebut haruslah diperlukan adanya suatu sistem yang dapat memadukan kegiatan tersebut, baik antara pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan desa yang terpadu, menyeluruh yaitu suatu sistem Unit Daerah Kerja Permanen (UDKP) dimana dalam sistem ini adalah untuk mempercepat suatu proses dan laju pembangunan pedesaan dengan berbagai usaha yang lebih

terpadu pada tingkat yang cukup dekat dengan masyarakat desa dan untuk mempercepat pemerataan program-program pembangunan desa, mempercepat peningkatan keterampilan aparat pemerintah desa dan sekaligus mendekatkan program-program pembangunan pada kelompok-kelompok sasaran yaitu kelompok miskin di pedesaan. Akhirnya konsep UDKP menyangkut pengertian keterpaduan, terpadu artinya adanya kaitan antara berbagai program-program yang mencakup pembangunan fisik, ekonomi, sosial kultural dan spiritual.

Adapun yang menyangkut persoalan keterpaduan dalam kegiatan pembangunan adalah :

- a. Terpadu sasaran yang hendak dicapai yaitu terwujudnya desa swasembada di seluruh Indonesia sebagai sasaran antara lain dalam rangka mewujudkan masyarakat yang terpenuhi baik lahirnya maupun batin.
- b. Terpadu penyelenggaraanya yang terdiri dari banyak kegiatan sektoral regional yang dilaksanakan oleh departemen dan lembaga non departemen dengan dukungan dan prakarsa swadaya gotong royong masyarakat.

Kesamaan paham antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci utama suatu kegiatan pembangunan yang sementara digalakkan, dan pembangunan itu harus selalu dinamis serta berkelanjutan dan terkoordinasi dengan sebaik mungkin.

Mengingat bahwa dalam pembangunan desa melekat sifat multi sektoral, maka mengharuskan bahwa pembangunan desa

harus dilaksanakan secara terpadu, terpadu dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga optimasi dari pada pembangunan tersebut dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna, dalam hal ini pembangunan desa menempatkan diri dalam tiga sifat yaitu :

1. Sebagai metode pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa, melalui pembangunan pedesaan, karena sebagian besar masyarakat adalah tinggal dan berusaha didesa. Masyarakat adalah subyek dari pembangunan.
2. Sebagai program yang menyangkut berbagai segi terakumulasi dalam bentuk program-program yang pelaksanaannya di Desa dan memerlukan keikutsertaan masyarakat desa.
3. Sebagai gerakan, dimana harus dilaksanakan secara menyeluruh di pedesaan, sebagai gerakan, maka diperlukan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan dirinya dalam keadaan yang lebih baik.
4. Sasaran Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan.

Bahwa sasaran atau tujuan yang ingin dicapai terhadap pelaksanaan pembangunan di pedesaan adalah searah atau sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu terwujudnya suatu masyarakat pancasila yakni masyarakat adil dan makmur. Pembangunan desa merupakan bagian kecil yang tersirat dalam pembangunan nasional, maka dalam tahap pelaksanaannya harus senantiasa sama dan searah dalam pembangunan di pedesaan.

Untuk itu dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia disebutkan bahwa :

" Tujuan pembangunan pedesaan adalah untuk meletakkan landasan yang kokoh dan kuat bagi masyarakat pedesaan untuk berkembang atas kekuatan dan kemampuan sendiri dalam melaksanakan pembangunan desanya ". (13)

Dalam pelaksanaan program terpadu sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan parasarana dan sarana yang dibutuhkan sesuai prioritas yaitu berupa :

1. Pembangunan prasarana yakni tersedianya prasarana produksi, prasarana perhubungan, prasarana pemasaran, prasarana sosial dan prasarana lainnya.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
3. Memperluas kesempatan dan lapangan kerja.
4. Meningkatkan kesehatan dan lingkungan desa melalui program kebersihan, keindahan dan ketertiban.

sedangkan peranan pemerintah dalam hal ini hanyalah memberikan bantuan, pengarahan, bimbingan pengendalian yang dapat meningkatkan usaha swadaya gotong royong dari masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang dari desa yang swadaya menjadi desa swakarsa dan desa swasembada.

Sehubungan dengan masalah penegasan tersebut diatas maka dalam hal ini yakni pencapaian harus berdasarkan dengan suatu kebijaksanaan yang telah ditetapkan, yaitu skala prioritas dengan dua bagian besar adalah sasaran pembangunan jangka pendek dan jangka panjang yang mengutamakan perluasan lapangan kerja dan peningkatan produksi pemerataan dan penyebaran penduduk, pengembangan koperasi serta keluarga

berencana dan pendidikan jangka panjang adalah meletakkan landasan yang kuat agar desa-desa mampu melaksanakan pembangunan dengan sendiri dan secara swadaya dan bergotong royong.

Berikut ini ada 10 langkah dalam proses pembangunan dengan keswadayaan masyarakat :

1. Penyiapan diri KPD dan LKMD
2. Pendataan Umum dan prioritas lokasi garapan pembangunan.
3. Penyiapan masyarakat dan lokasi garapan pembangunan.
4. Pendataan bersama masyarakat pada lokasi garapan pembangunan.
5. Penyusunan rencana pembangunan bersama masyarakat pada lokasi garapan pembangunan.
6. Penyusunan prioritas usul rencana pembangunan tingkat desa/kelurahan.
7. Pengorganisasian dan pengarahan swadaya gotong royong.
8. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pembangunan.
9. Penilaian dan pelaporan keberhasilan pembangunan.
10. Tindak lanjut hasil pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan desa yang akan direalisasikan dalam suatu daerah, dalam hal ini dikelurakan di Kelurahan Sungguminasa bahwa pelaksanaan suatu pelaksanaan pembangunan desa, serta pengadaan fasilitas harus didahului dengan suatu perencanaan dari kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan awal dari seluruh rangkaian proses

perencanaan tersebut adalah harus didahului suatu orientasi obyek permasalahan seperti dalam pembangunan desa, maka yang terlibat langsung adalah Kepala Desa/ Kelurahan beserta pengurus LKMD dan Kepala-kepala lingkungan, dan dalam hal ini yang memegang peranan penting adalah tokoh masyarakat sebab dari kegiatan tokoh masyarakat hal inilah yang lebih banyak mengetahui secara mendetail tentang keberadaan sektor mana serta fasilitas yang utama dalam rangka pengoprasionalan berbagai macam pembangunan.

Tentunya dalam hal ini dasar untuk menentukan segala kegiatan yang perlu dilaksanakan adalah masalah potensi-potensinya yang perlu dilaksanakan yakni baik potensi manusianya maupun yang akan menyangkut potensi ekonominya, karena pada dasarnya kedua faktor potensi tersebut sangat erat kaitannya dalam rangka menentukan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan.

Meskipun dalam pembangunan desa yang berorientasi pada pembangunan desa dimana untuk kehidupan manusia dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan iklim/suasana kehidupan fisik yang mencakup unsur-unsur komponen fisik sebagai berikut :

1. Kualitas kehidupan fisik, ini berarti bahwa pembangunan manusia dapat dikatakan berhasil apabila ada peningkatan mutu kehidupan fisik setiap anggota masyarakat yang antara lain mencakup mutu lingkungan fisik, pola konsumsi, dan pemenuhan konsumsi fisik dan rasa aman

dari gangguan-gangguan fisik.

2. Mata pencarian, Pembangunan harus mampu meningkatkan secara terus menerus jumlah penduduk yang semakin mudah memperoleh nafkah.

3. Individualitas dan kebebasan memilih.

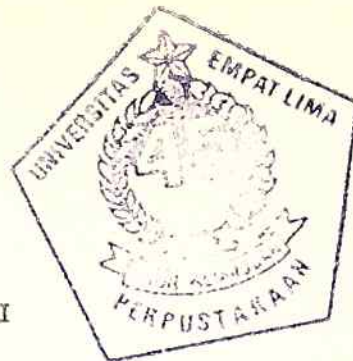
Pembangunan manusia yang berhasil berarti meningkatkan bagian penduduk yang semakin mampu menentukan nasibnya sendiri.

4. Pengembangan diri, pembangunan yang berhasil harus mampu meningkatkan jumlah penduduk yang kesadaran lingkungannya semakin besar, dan mampu berupayah sendiri untuk meningkatkan keterampilanya.

5. Pemekaran kehidupan sosial politik.

Pembangunan nasional yang berhasil harus pula berarti ada pertambahan jumlah penduduk yang semakin mampu ikut serta secara aktif dalam putusan-putusan (politik) yang menyangkut nasib mereka.

Demikian lima unsur pembangunan, manusia kait mengkait satu sama lain, dan secara keseluruhan sesungguhnya sudah tercatup dalam GEHRI, yaitu yang disebut sebagai kemauan lahiriah dan batiniah karena adanya berbagai unsur pembangunan manusia tersebut, maka pembangunan desa memang menyangkut banyak faktor-faktor yakni antara lain kebijaksanaan dan program-program pemerintah, sehingga dengan adanya faktor tersebut kemungkinan apa yang telah dicanangkan atau diprogramkan akan berhasil sesuai dengan yang diharapkan.



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI

PENELITIAN KELURAHAN SUNGGUMINASA

1. Selayang Pandang Kelurahan Sungguminasa

Kelurahan Sungguminasa merupakan salah satu dari empat buah kelurahan yang ada dalam wilayah kecamatan Somba Opu yang terletak ditengah-tengah ibu kota kabupaten daerah tingkat II Gowa, yang pada mula berdirinya (Pada zaman Kerajaan Gowa) bernama " Tompobalang " yang mula pertama dibuka oleh ACHMAD DAENG GASSING sekitar tahun 1890. Kemudian pada tahun 1897 " Tompobalang " ini berganti nama menjadi " Sungguminasa " yang terdiri dari dua suku kata, yakni " Sunggu " dan "Minasa" yang masing-masing mempunyai arti tersendiri yaitu "Sunggu" yang berarti baik/benar, sedangkan " Minasa" yang berarti harapan atau cita-cita. Jadi arti dari pada "Sungguminasa" adalah harapan atau cita-cita yang baik.

Yang pertama memerintah (Kepala Kampung) setelah berganti nama menjadi Sungguminasa ialah BASOI DAENG MABUNGA, yang memerintah dari tahun 1897-1927, selanjutnya BASOI DAENG MABUNGA diganti oleh saudaranya yang bernama HAMJAH DAENG NOMBONG yang memerintah dari tahun 1927-1962, Beliau ini digantikan oleh keponakannya yang bernama ACHMAD DAENG BUANG yang masa pemerintahan Beliau yaitu dari tahun 1962-1968, istilah Kepala Desa sudah mulai ada pada masa Beliau tersebut. Hal ini didasarkan pada undang-undang

nomor 19 tahun 1965 tentang desa praja yang sudah tidak berlaku lagi saat sekarang ini.

Istilah Kepala Desa ini semakin populer ditelinga masyarakat Sungguminasa pada masa ABDUL KHALIK DAENG MONE yang memerintah dari tahun 1968-1975, samapi pada BACOA DAENG LAWA yang memerintah dari tahun 1975-1978. kemudian ABDUL KARIM BA, yang memerintah sejak tahun 1978-1981, istilah kelurahan sudah menjadi ada pada masa beliau ini, hal tersebut didasarkan pada undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa yang tujuan diciptakannya undang-undang tersebut adalah untuk menyeragamkan dan memperkuat Pemerintahan Desa. Dan didalam undang-undang tersebut disebutkan sebagai mana pasal 22 ayat (1) adalah sebagai berikut :

" Dalam ibu kota negara, Ibu kota Propensi, Ibu kota Kabupaten, Kota madya, Kota administratif, dan kota-kota lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri dapat dibentuk Kelurahan ". (14)

Mengingat Sungguminasa yang lokasinya terletak ditengah-tengah ibu kota kabupaten Daerah Tingkat II Gowa maka Sungguminasa yang dulunya disebut Desa berubah nama menjadi sebuah kelurahan yakni Kelurahan Sungguminasa, sebagaimana layaknya sebuah kelurahan harus dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil, maka diangkatlah ABDUL KARIM BA sebagai Lurah Sungguminasa sebagaimana yang telah disebutkan diatas yang memerintah dari tahun 1978-1981, dan diganti oleh ANDI ARSYAD BASO yang memerintah dari tahun

1981-1989, kemudian beliau diganti oleh MUCHSIN AMDAT BA, sebagai Lurah Sungguminasa yang memerintah mulai tanggal 2 Nopember 1989 sampai sekarang.

2. Geografi.

Letak atau lokasi suatu daerah menentukan besar kecilnya isolasi suatu daerah terhadap daerah-daerah lainnya, lokasi suatu daerah yang baik dapat merangsang kemajuan daerah itu, sebaiknya bila letak daerah itu kurang menguntungkan misalnya : terisolir jauh dari daerah-daerah lainnya memungkinkan daerah itu akan statis keadaannya. Demikian misalnya bila suatu daerah lebih maju dari padanya maka lokasi tersebut akan potensial, karena daerah yang lebih maju tersebut akan mendorong daerah didekatnya.

Kelurahan Sungguminasa merupakan salah satu dari empat buah kelurahan yang ada dalam wilayah Kecamatan Somba Opu, yang letaknya ditengah-tengah Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang wilayahnya memanjang dari barat ketimur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Tetebatu Kecamatan Pallangga.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu.

Kelurahan Sungguminasa mempunyai luas wilayah secara administratif yaitu 6,21 km², dengan ketinggian 2 meter diatas permukaan laut, adapun luas Kelurahan Sungguminasa yang meliputi 3 lingkungan adalah sebagai berikut :

TABEL I
KEADAAN LUAS KELURAHAN SUNGGUMINASA
DALAM TIAP LINGKUNGAN TAHUN 1990

No.	Lingkungan	Luas (km ²)	Prosentase
1.	Sungguminasa	1,06	17,06 %
2.	Bonto-bontoa	2,06	33,17 %
3.	Batangkaluku	3,09	49,75 %
Jumlah		6,21	100 %

Sumber : Basis data tingkat Desa/Kelurahan Sungguminasa.

Dari Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa yang paling luas adalah lingkungan Batangkaluku dengan luas yaitu 3,09 km² atau 49,75 %, sedangkan yang paling sempit adalah lingkungan Sungguminasa dengan luas hanya 1,06 km² atau 17,06 %, diantara ketiga lingkungan tersebut dua diantaranya adalah merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan yaitu masing-masing lingkungan Sungguminasa dan Lingkungan Bonto-bontoa.

2.1. Wilayah Pemerintahan.

Kelurahan Sungguminasa ini dibagi dalam wilayah lingkungan, Organisasi Rukun Warga (ORW) dan Organisasi

Rukun Tetangga (ORT), untuk lingkungan terdiri dari tiga wilayah masing-masing adalah lingkungan Sungguminasa, lingkungan Bonto-bontoa dan lingkungan Batangkaluku sedangkan untuk Organisasi Rukun Tetangga (ORT) dan Organisasi Rukun Warga (ORW) masing-masing terdiri dari ORW sebanyak 14 (empat belas) buah dan ORT sebanyak 45 buah dan untuk lebih jelasnya seperti pada Tabel dibawah ini.

TABEL II

JUMLAH LINGKUNGAN, ORW DAN ORT
DIKELURAHAN SUNGGUMINASA TAHUN 1990

No.	Lingkungan	ORW	ORT
1.	Sungguminasa	5	14
2.	Bonto-bontoa	5	17
3.	Batangkaluku	4	14
Jumlah		14	45

Sumber : Basis data tingkat desa/kelurahan Sungguminasa.

2.2 Keadaan tanahnya

Dengan melihat keadaan tanah, Kelurahan Sungguminasa adalah cukup potensial karena terdapat tanah pertanian dan juga areal perkebunan, walaupun untuk areal perkebunan hanya ada pada lingkungan Batangkaluku dengan luas hanya 3 Ha. Disamping itu kelurahan ini juga sangat strategis karena berada pada jalan yang menghubungkan jalan propinsi yakni

yang kearah barat menuju kota madya Ujung Pandang, dan arah ketimur menuju ke Objek wisata Malino.

Diwilayah Kelurahan Sungguminasa ini dialiri sebuah sungai yakni sungai Jeneberang, tepatnya pada pesisir selatan, hal ini dapat dibuktikan dengan tumbuhnya beraneka ragam tanaman dan tumbuhan, baik tanaman jangka panjang maupun jangka pendek seperti kacang ijo, kacang kedelai, kacang tanah, padi dan lain-lain.

Adapun keadaan tanah (tata guna tanah) kelurahan Sungguminasa, seperti pada tabel dibawah ini :

TABEL III

TATA GUNA TANAH DI KELURAHAN
SUNGGUMINASA TAHUN 1990 (Ha)

No.	Lingkungan	Sawah	Kebun	Pekarangan
1.	Sungguminasa	37	-	68
2.	Bonto-bontoa	86	-	134
3.	Batangkaluku	117	3	175
j u m l a h		240	3	377

Sumber : basis data tingkat Desa/Kelurahan Sungguminasa.

Dari tabel tersebut diatas nampak bahwa untuk areak pertanian dan perkebunan tinggal 243 Ha yang produktif, hal ini disebabkan oleh adanya perluasan kota dengan mempergunakan areal pertanian dan perkebunan sebagai tempat pemukiman penduduk.

2.3. Keadaan Iklimnya.

Seperti halnya iklim didaerah Sulawesi Selatan pada umumnya, maka daerah ini mengalami musim hujan pada bulan Nopember sampai dengan bulan April dan musim kemarau mulai bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedangkan masa pasca roba mulai bulan Mei.

Selain dari hal tersebut diatas, daerah ini mengalami suhu udara berkisar antara 28 C - 30 C dengan kelembaban udara 70 %, sedangkan curah hujan yang terjadi didaerah ini sesuai dengan data yang diperoleh pada kantor Kelurahan Sungguminasa adalah rata-rata 2000-3000 mm per tahun dimana curah hujan yang tertinggi terjadi pada bulan januari dan terendah pada bulan Agustus dengan Frekwensi rata-rata 164,58 mm.

3. Demografi.

3.1. Keadaan dan jumlah penduduk Kelurahan Sungguminasa.

Jumlah penduduk kelurahan Sungguminasa adalah 18,582 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 8.900 orang dan perempuan sebanyak 9.682 orang, seperti pada tabel tersebut dibawah setiap lingkungan :

TABEL IV
KEADAAN/JUMLAH PENDUDUK TIAP
LINGKUNGAN PADA TAHUN 1990

No.	Lingkungan	jenis kelamin		Jumlah	%
		LK	PR		
1.	Sungguminasa	3.665	3.909	7.574	40,75
2.	Bonto-bontoa	2.916	3.134	6.050	32,55
3.	Batangkaluku	2.319	2.639	4.958	26,68
J u m l a h		8.900	9.682	18.582	100

Sumber : basis data tingkat Desa/Kelurahan Sungguminasa.

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang terbanyak diantara ketiga lingkungan adalah lingkungan Sungguminasa dengan jumlah 7.574 jiwa atau 40,75 %, disamping itu pada tiap lingkungan menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dari pada jumlah laki-laki, hal tersebut menunjukkan jumlah penduduk yang wajar, karena dalam suatu masyarakat terdapat sexratio lebih dari 100 dalam hal ini lebih banyak laki-laki, maka sering terjadi kriminalitas yang bersumber dari masalah kekurangan wanita itu, tetapi jika sexratio kurang dari 100, tidaklah menimbulkan masalah, karena dibeberapa daerah masalah kelebihan wanita ini dapat diatasi dengan poligami yaitu laki-laki mengawini lebih dari seorang wanita sebagai isteri. Dan untuk di Kelurahan Sungguiminasa dengan sexratio 8.900 laki-laki berbanding 9.682 perempuan. Dalam tabel

tersebut diatas juga bisa kita lihat bahwa jumlah penduduk dari lingkungan Sungguminasa yang paling padat penduduknya, hal ini tidaklah mengherankan karena daerahnya sebagian besar merupakan perkotaan yakni merupakan pusat perdagangan dari semua lingkungan yang ada di kelurahan Sungguminasa, jadi secara tidak langsung akan mempengaruhi populasi jumlah kepadatan penduduk dari daerah-daerah lain sekitarnya.

3.2. Komposisi penduduk menurut umur.

Komposisi penduduk menurut umur menunjukkan gambaran tentang kemungkinan pertambahan penduduk, jumlah tenaga kerja yang tersedia, jumlah anak-anak usia sekolah dan jumlah penduduk yang dapat dikerahkan untuk pertahanan negara. Untuk memperoleh komposisi penduduk menurut umur, seluruh penduduk dikelompokkan dalam usia lima tahun atau sepuluh tahun misalnya : 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, 30 -34, dan seterusnya, dan untuk lebih jelasnya seperti nampak pada tabel tersebut dibawah ini, yang menunjukkan kelompok anak-anak, orang dewasa, dan orang tua.

TABEL V

KEADAAN-JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR DAN
JENIS KELAMIN DI KELURAHAN SUNGGUMINASA TAHUN 1990

No.	Tingkat Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		LK	PR		
1.	0 - 4	937	975	1912	10,28
2.	5 - 9	1249	1185	2434	13,09
3.	10 - 14	1113	1219	2332	12,54
4.	15 - 19	1137	1208	2348	12,61
5.	20 - 24	862	937	1799	9,68
6.	25 - 29	706	841	1547	8,32
7.	30 - 34	474	543	1017	5,47
8.	35 - 39	462	506	968	5,20
9.	40 - 44	475	512	987	5,31
10.	45 - 49	399	439	838	4,50
11.	50 - 54	306	409	715	3,84
12.	55 - 59	262	288	550	2,95
13.	60 - 64	247	372	619	3,33
14.	64 keatas	161	248	409	2,20
Jumlah		8900	9682	18582	100 %

Sumber : Basis data tingkat Desa/Kelurahan Sungguminasa.

Pada Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk produktif yang digolongkan dalam kelompok umur 15 - 64 tahun mencapai sebesar 5430 orang atau 29,22 %, kelompok

ini biasanya di bagi lagi atas ; kelompok usia 15 - 34 tahun yang biasa disebut usia produktif dan reproduktif mudah jumlah ini mencapai 3279 orang atau 17,64 % dan kelompok 35 - 64 atau usia produktif dan reproduktif tua mencapai 2151 orang atau 11,57 %, sedangkan jumlah penduduk non produktif yang digolongkan kedalam kelompok umur 0 - 14 tahun yang merupakan kelompok anak-anak masih memerlukan biaya pendidikan dan pemeliharaan, serta umur 64 tahun keatas termasuk orang tua yang memerlukan bantuan santunan sebanyak 3460 orang atau 18,62 %.

3.3. Keadaan Penduduk menurut mata pencaharian.

Keadaan penduduk menurut mata pencaharian memberikan gambaran tentang struktur ekonomi suatu negara atau daerah tertentu. Sesuai dengan data yang tersedia pada sumber nampak jenis mata pencaharian terbagi atas tujuh klassifikasi atau bagian yaitu penduduk yang bekerja sebagai petani, peternak, buruh, pedagang, pengusaha besar, pengusaha sedang, guru, pegawai negeri/swasta dan ABRI, untuk melihat sejauh mana keadaan penduduk menurut jenis mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel tersebut dibawah ini :



TABEL VI

KEADAAN/JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA
PENCAHARIAAN DI KELURAHAN SUNGGUMINASA TAHUN 1990

No.	Mata Pencaharian	Banyaknya	Prosentase
1.	Petani	238	4,37 %
2.	Peternak	127	2,33 %
3.	Buruh	2557	47,02 %
4.	Pedagang	1132	20,82 %
5.	Pengusaha	251	4,61 %
6.	Guru	198	3,64 %
7.	Pegawai/ABRI	934	17,17 %
Jumlah		5437	100 %

Sumber : basis data tingkat Desa/Kelurahan Sungguminasa.

Pada Tabel tersebut diatas nampak dengan jelas bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 5437 orang yang terdiri dari beberapa jenis pekerjaan, dan menunjukkan bahwa penduduk Kelurahan Sungguminasa sebagian besar adalah buruh dan pedagang dimana jumlah buruh sebanyak 2557 orang atau 47,02 %, dan pedagang sebanyak 1132 orang atau 20,82 %, sedangkan selebihnya adalah pegawai dan ABRI sebanyak 17,17 %, serta beberapa jenis pekerjaan atau jenis usaha sampingan lain seperti beternak, namun belum ada yang mengkhususkan sebagai sumber penghasilan utama. Ternak yang paling banyak

dirasakan manfaatnya dan belum dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat petani seperti kerbau.

Untuk jenis ternak seperti kerbau dan jenis ternak lainnya di Kelurahan Sungguminasa jumlah tergolong sedikit hal ini disebabkan oleh suasana kehidupan kota.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis serta jumlahnya dapat kita lihat pada tabel tersebut dibawah ini :

TABEL VII
JENIS TERNAK DI KELURAHAN SUNGGUMINASA
TAHUN 1990

No.	Jenis Ternak	Banyaknya	Prosentase
1.	Kuda	8	0,07 %
2.	Sapi	18	0,16 %
3.	Kerbau	55	0,51 %
4.	Kambing	100	0,93 %
5.	Ayam	7760	72,51 %
6.	Itik	760	7,10 %
J u m l a h		10701	100 %

Sumber : Basis data tingkat Desa/Kelurahan Sungguminasa.

3.4. Keadaan penduduk menurut pendidikan.

Keadaan penduduk menurut pendidikan memberikan gambaran umum tentang kecerdasan penduduk suatu negara dan dapat dijadikan pedoman dalam menyusun program pendidikan baik secara nasional maupun secara regional dan lokal.

Pendidikan adalah sangat penting, karena pendidikan dapat berpengaruh pada keadaan dan perubahan sosial dimasa depan.

Perkembangan ekonomi juga banyak tergantung pada tingkat dan luasnya pendidikan rakyat, misalnya pada bidang pendidikan eksakta, teknik, ekonomi dan sosial budaya.

Untuk Kelurahan Sungguminasa adapun jumlah penduduk yang sementara belajar adalah seperti pada tabel tersebut dibawah ini :

TABEL VIII

KEADAAN/JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN SERTA SARANA PENDIDIKAN YANG ADA
TAHUN 1990

No.	Jenis Sekolah	Sarana	Pelajar	%
1.	TK	5	576	4,18
2.	SD	16	2645	19,20
3.	SLTP	12	2926	35,75
4.	SLTA	11	4721	34,26
5.	Akademi/universitas	-	908	6,59
Jumlah		44	13776	100 %

Sumber : Basis data tingkat desa/kelurahan Sungguminasa.

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa penduduk kelurahan Sungguminasa yang sementara belajar sebanyak 13.776 orang pada berbagai tingkatan. Tingkat pendidikan sudah mulai maju, hal ini ditunjang oleh berbagai faktor

misalnya : sarana pendidikan diberbagai tingkat sekolah sudah memadai, disamping itu juga minat belajar usia sekolah juga sangat menonjol seperti tingkat SD dengan jumlah sebanyak 2645 orang atau 19,20 % dan SLTP sebanyak 4926 orang atau 35,75 % sedangkan tingkat SLTA mencapai 34,26 % atau 4721 orang, namun yang sangat lanjut atau duduk diperguruan tinggi hanya 906 orang atau 6,59 %, hal ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor, namun faktor yang paling menonjol yakni ekonomi.

3.5. Keadaan penduduk menurut Agama.

Keadaan penduduk menurut agama memberikan gambaran tentang kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, gambaran semacam ini perlu sekali untuk disesuaikan dengan kebijaksanaan pembangunan yang akan diselenggarakan pada setiap daerah, sehingga tidak akan bertentangan dengan setiap norma agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Mengingat agama merupakan

" suatu sistim kepercayaan kepada Tuhan dan sistim penyembahan kepada Tuhan ". Dan sehubungan dengan hal tersebut maka dijelaskan bahwa manusia itu memerlukan tempat bermohon atau tempat untuk meminta dari keinginan manusia itu sendiri.

Seperti diketahui bahwa tiap pemeluk agama mempunyai rumah ibadah masing-masing, untuk kelurahan Sungguminasa sarana ibadah yang ada hanya terdiri dari masjid dan gereja yang nampak pada tabel tersebut dibawah ini :

TABEL IX
 JUMLAH DAN JENIS SARANA IBADAH YANG ADA
 DI KELURAHAN SUNGGUMINASA TAHUN 1990

No.	Sarana Ibadah	Banyaknya	Prosentase
1.	Masjid	15	88,23 %
2.	Gereja	2	11,76 %
3.	Pura	-	-
4.	Candi	-	-
Jumlah		17	100 %

Sumber : Basis data tingkat Desa/Kelurahan Sungguminasa.

3.6. Kesehatan.

Masyarakat Kelurahan Sungguminasa pada umumnya dilihat dari segi kesehatan sebenarnya sudah cukup baik namun masih perlu diadakan pendekatan-pendekatan atau penyuluhan terutama yang menyangkut kebersihan pekarangan atau lingkungan serta gizi keluarga. Dalam hal seperti ini semua pihak dituntut tanggung jawabnya, terutama para aparat pemerintah pada umumnya dan tenaga kesehatan pada khususnya serta semua masyarakat yang bersangkutan.

Untuk Kelurahan Sungguminasa jumlah tenaga kesehatan yang ada, adalah sebagai berikut seperti pada tabel dibawah ini :

TABEL X
 JUMLAH TENAGA KESEHATAN
 DI KELURAHAN SUNGGUMINASA TAHUN 1990

No.	Tenaga Kesehatan	Banyaknya	Prpsentase
1.	D o k t e r	14	10,29 %
2.	P e r a w a t	59	43,38 %
3.	B i d a n	26	19,11 %
4.	M a n t r i	16	11,76 %
5.	D u k u n	11	8,08 %
6.	Kader Gizi	10	7,35 %
J u m l a h		136	100 %

Sumber : Basis data tingkat Desa/Kelurahan Sungguminasa.

Dari tabel tersebut diatas nampak jelas bahwa tenaga kesehatan yang ada di Kelurahan Sungguminasa sebanyak 136 orang. Tenaga-tenaga tersebutlah yang banyak memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat serta banyak memberikan bantuan/pertolongan terhadap anggota masyarakat yang mengalami kecelakaan atau sakit.

Dalam memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat tentu didukung oleh sarana atau tempat dalam memberikan pelayanan atau pengobatan kepada masyarakat. Tempat tersebut adalah sebagai berikut, seperti pada tabel dibawah ini :

TABEL XI
 JUMLAH SARANA KESEHATAN
 DI KELURAHAN SUNGGUMINASA TAHUN 1990

No.	Sarana Kesehatan	Banyaknya
1.	Rumah Sakit Umum (RSU)	1
2.	Puskesmas	1
3.	Rumah Sakit Bersalin	2
4.	Poliklinik	3
5.	B K I A	2
J u m l a h		9

Sumber : Basis data tingkat Desa/Kelurahan Sungguminasa.

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah sarana kesehatan yang ada di Kelurahan Sungguminasa terdiri dari 9 buah, hal ini menunjukkan bahwa sarana kesehatan memang sudah cukup memadai, namun hal itu juga harus ditunjang dengan pelayanan medis yang baik, sehingga masyarakat dapat merasakan adanya suatu perhatian yang besar serta serius dari aparat-aparat yang terlibat secara langsung dengan kesehatan dan hal ini tentu akan membawa dampak yang positif, disamping itu pula peran Pemimpin Informal juga sangat diharapkan dalam menunjang perogram yang telah dicanamkan oleh instansi kesehatan, karena dengan adanya pendekatan-pendekatan dari Pemimpin Informal tersebut

maka masyarakat akan mematuhi anjuran atau saran-saran yang bersifat positif.

3.7. Keluarga Berencana.

Keluarga Berencana di Kelurahan Sungguminasa boleh dikatakan sudah diterima dan disambut baik oleh warga masyarakat, hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya peserta atau akseptor KB, bertambahnya peserta tersebut berkat usaha dan kerja keras petugas-petugas KB dan kader gizi, disamping itu pula adanya pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam hal ini instansi kesehatan terhadap para tokoh masyarakat atau Pemimpin Informal untuk membantu memberikan pengertian kepada warga masyarakat. Adapun jumlah akseptor KB dan pasangan usia subur bisa kita lihat pada tabel dibawah ini :

TABEL XII
JUMLAH AKSEPTOR KB DAN PASANGAN USIA SUBUR
KELURAHAN SUNGGUMINASA TAHUN 1990

No.	Akseptor KB/PUS	Banyaknya	Prosentase
1.	Pasangan Usia Subur	2281	61,41 %
2.	P i l	950	25,57 %
3.	I u d	207	5,57 %
4.	K o n d o m	10	0,26 %
5.	S u n t i k a n	202	5,43 %
6.	M o w	64	1,72 %
J u m l a h		3714	100 %

3.8. Sarana Angkutan/Transportasi.

Sarana angkutan adalah merupakan sarana yang tidak kurang pula manfaatnya, bukan saja sebagai alat yang mampu menghubungkan penduduk antar daerah satu dengan daerah yang lainnya, tetapi disamping itu pula merupakan sarana yang dapat memajukan kegiatan ekonomi suatu daerah atau negara. Untuk Kelurahan Sungguminasa jenis transportasi yang ada hanya meliputi angkutan darat seperti pada tabel tersebut dibawah ini :

TABEL XIII
JUMLAH SARANA ANGKUTAN/TRANSPORTASI
KELURAHAN SUNGGUMINASA TAHUN 1990

No.	Jenis Kendaraan	Banyaknya	Prosentase
1.	B i s	18	1,21 %
2.	O p l e t	129	8,67 %
3.	T r u k	47	3,16 %
4.	S e d a n	23	1,54 %
5.	Sepeda motor	658	44,25 %
6.	B e c a k	63	4,23 %
J u m l a h		1487	100 %

Sumber : Basis data tingkat Desa/Kelurahan Sungguminasa.

3.9. Sarana Komunikasi.

Sarana Komunikasi adalah merupakan sarana yang tidak kalah pentingnya dalam era informasi dan globalisasi saat

sekarang ini, banyak manfaat yang kita peroleh lewat media atau sarana ini, keadaan yang jauh pun dapat kita ketahui melalui media ini. Untuk kelurahan Sungguminasa sarana komunikasi yang dapat kita lihat pada tabel tersebut dibawah ini :

TABEL XIV
JUMLAH SARANA KOMUNIKASI
DI KELURAHAN SUNGGUMINASA TAHUN 1990

No.	Saran Komunikasi	Banyaknya	Keterangan
1.	R a d i o	1826	
2.	T e l e v i s i	1340	
3.	V i d i o	44	
4.	T e l e p o n	81	
5.	T e l e g r a f	1	
6.	P o s	1	
7.	S S B	2	
8.	S B	14	
9.	Pesawat Orari/Krap	13	
J u m l a h		3322	



Sumber : Basis data tingkat Desa/Kelurahan Sungguminasa.

4. Sosial Ekonomi Masyarakat.

Perekonomian Kelurahan Sungguminasa sebenarnya sudah cukup baik dan nampak serta strategis, karena kelurahan sungguminasa merupakan letak dari Ibukota Kabupaten, dimana

terdapat pasar Kabupaten(Pasar sentral Sungguminasa) sebagai pusat kegiatan jual beli dari warga masyarakat Kelurahan Sungguminasa, sehingga mau tidak mau sebagian besar warga masyarakat sedikit-sedikit diwarnai oleh suasana dunia perkotaan, dan sudah barang tentu hal ini akan pula menjurus kearah suatu kesibukan dibidang ekonomi dan lain-lain. Dan keadaan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Sungguminasa boleh dikatakan rata-rata cukup baik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat boleh dibilang cukup memadai.



BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

A. Keterlibatan Pemimpin Informal Dalam Pembangunan Desa.

Seorang pemimpin khususnya dalam kemasyarakatan harus pintar, gesit serta mampu untuk menenangkan jiwa dan raga serta mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap apa dan siapa yang pada saat itu di pimpinnya, karena dengan jalan inilah pemimpin tersebut akan mendapat simpati dari anggota yang dipimpinya dan itulah pula bahwa watak seorang pemimpin haruslah sejalan dengan apa yang dipimpinya.

Para tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Sungguminasa, tentunya partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan pembangunan desa sangatlah diharapkan, sebab dalam kehidupan masyarakat, tokoh masyarakat menduduki posisi yang baik dalam mengajal serta mengarahkan yang lainnya untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan.

Keterlibatan para tokoh masyarakat dalam hal membicarakan permasalahan pembangunan desa merupakan suatu hal yang penting untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan pembangunan karena tokoh masyarakat tersebut telah mengetahui aspirasi dari masyarakat, dan serangkaian dari itu tentunya harus didukung oleh berbagai macam potensi atau fasilitas yang tersedia dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang telah ditargetkan.

Tokoh Masyarakat atau Pemimpin Informal yang

diharapkan haruslah senantiasa terjun langsung dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebab tanpa keterlibatan langsung dari tokoh masyarakat maka pembangunan yang diharapkan akan mengalami suatu hambatan dengan kata lain kurang begitu sukses, jadi suatu keberhasilan pembangunan desa tergantung dari pada keterlibatan langsung tokoh masyarakat itu sendiri, karena pada dasarnya pembangunan itu merupakan kegunaan dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri, dengan demikian maka partisipasi masyarakat juga sangat besar pengaruhnya terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan disamping keterlibatan tokoh masyarakat seperti dikemukakan diatas.

TABEL XV

ANALISA TENTANG KETERLIBATAN TOKOH MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KELURAHAN SUNGGUMINASA

No.	Jawaban Responden	Banyaknya	Prosentase
1.	Selalu Aktif	57	62 %
2.	Kadang-kadang Aktif	28	30,4 %
3.	Kurang Aktif	7	7,6 %
4.	Tidak pernah Aktif	-	-
Jumlah		92	100 %

Sebagai kesimpulan bahwa betapa besar partisipasi dan peranan tokoh masyarakat di Kelurahan Sungguminasa dimana

dalam tabel tersebut diatas sesuai dengan hasil penelitian menggambarkan bahwa Pemimpin Informal yang selalu aktif sangat besar jumlahnya yaitu 62 % dibandingkan dengan yang kadang-kadang aktif hanya 30,4 % dan adapun yang kurang aktif hanya 7,6 % jadi jelaslah disini bahwa dalam hal ini membuktikan animo dari Pemimpin Informal di Kelurahan Sungguminasa untuk melihat daerahnya lebih maju dalam pembangunan berhasil cukup besar.

Dalam kesempatan itu pula penulis mengadakan wawancara langsung dengan Pemimpin Informal tentang hal-hal apa yang memotifasi untuk turut serta dalam kegiatan tentang pembangunan desa, dan para Pemimpin Informal tersebut menjawab bahwa keterlibatan mereka atas dasar kesadaran sendiri, karena mereka merasa bahwa sumbangan-sumbangan yang berupa pikiran, gagasan serta ide-ide perlu disalurkan lewat kegiatan-kegiatan pembangunan desa, sebab pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab bersama dalam mencapai keberhasilan yang diinginkan.

Dan adapun dari segi latar belakang pendidikan dari para responden dalam hal ini Pemimpin Informal rata-rata mereka berpendidikan SLTP dan SLTA namun juga ada yang tamat akademik maupun sarjana serta juga dari tingkat dasar (SD). Dan berikut ini tabel tentang pendidikan mereka/responden.

TABEL XVI
 LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
 RESPONDEN PEMIMPIN INFORMAL

No.	Tingkat Pendidikan	Banyaknya	Prosentase
1.	Tamat SD	11	12 %
2.	Tamat SLTP	26	28,3 %
3.	Tamat SLTA	34	37 %
4.	Tamat Akademik	16	17,4 %
5.	Sarjana	5	5,3 %
Jumlah		92	100 %

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dari Pemimpin Informal di Kelurahan Sungguminasa yang paling menonjol adalah tamat SLTA yang berjumlah 37 % kemudian disusul tamat SLTP 28,3 % tamat akademik 17,4 % tamat SD 12 % dan terakhir tamat dari sarjana 5,3 % maka dalam hal ini tingkat pendidikan para Pemimpin Informal di Kelurahan Sungguminasa sangat memadai, hal itu disebabkan sarana pendidikan memadai di daerah ini disamping untuk mencapai pembangunan desa tersebut, karena pembangunan desa merupakan rangkaian secara keseluruhan dari semua aspek kehidupan dalam masyarakat dan perealisasiannya harus secara terpadu dan terarah dengan mengembangkan swadaya gotong royong.

Peranan Pemimpin Informal dalam kegiatan pembangunan

desa tentunya tidak kalah pentingnya dalam keikutsertaannya para Pemimpin Informal, karena mereka merupakan kunci pokok keberhasilan pembangunan itu sendiri, sebab peranan dari mereka itu merupakan suatu pertandah bahwa sebagian keberhasilan oleh pemerintah setempat tercapai dan disamping itu pula keikutsertaan masyarakat juga merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan tersebut maka mustahil tanpa kehadiran mereka dalam kegiatan pembangunan, apa yang diharapkan keberhasilannya akan sulit tercapai.

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan desa merupakan tanggung jawab oleh semua pihak yaitu baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya serta para tokoh masyarakat pada khususnya.

Dalam pembahasan ini penulis telah mengadakan suatu penelitian kepada sejumlah responden untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan atau kesediaan mereka dalam menyumbangkan pikiran serta tenaganya terhadap pembangunan desa baik berupa material maupun spiritual, hal ini akan tergantung pula dari suatu sisi yakni situasi serta kondisi masyarakat.

TABEL XVII

ANALISA TENTANG KEMAMPUAN PARA PEMIMPIN INFORMAL
UNTUK MENYUMBANG DALAM PEMBANGUNAN DESA

No.	Jawaban Responden	Banyaknya	Prosentase
1.	Sangat mampu	49	53,3 %
2.	Mampu	35	38,4 %
3.	Kurang mampu	8	8,3 %
4.	Tidak mampu	-	-
Jumlah		92	100 %

Dengan melihat tabel tersebut diatas, maka jelaslah bahwa kemampuan para Pemimpin Informal untuk menyumbang rata-rata mampu dimana hal ini terlihat dengan adanya jawaban mampu yakni 38,4 %, sangat mampu 53,3 % sedangkan kurang mampu hanya 8,3 %. dan penulis mengatakan, pula wawancara langsung dengan anggota masyarakat biasa atas kemampuannya menyumbang dalam pembangunan desa, rata-rata mereka menjawab mampu baik material maupun spritual karena mereka sadar pentingnya pembangunan, jadi jelaslah bahwa keberhasilannya tidak terlepas dari partisipasinya.

Begitu pula kehadiran para Pemimpin Informal sangat berperan dalam kegiatan pembangunan desa, dimana mereka selalu memberikan saran-saran atau pendapat bagi kelancaran pembangunan yang sedang dilaksanakan, karena tanpa saran-saran dari Pemimpin Informal pemerintah tidak akan bisa

melaksanakan suatu pembangunan desa.

Disamping itu pula dalam pembangunan desa mengalami hambatan, maka Pemimpin Informal senantiasa bekerja sama dan mengusahakan mengatasi hambatan itu agar pelaksanaan pembangunan itu berjalan terus, dan mencari jalan keluar dalam proses pelaksanaan pembangunan diusahakan secara berkemacetan yang akan mengakibatkan gagalnya suatu pembangunan, maka dalam hal ini Pemimpin Informal selalu searah dan seide untuk menciptakan hubungan yang baik dengan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

B. Pemimpin Informal dan Kebijakan Pemerintah.

Dalam melaksanakan pembangunan desa di Kelurahan Sungguminasa tentu didahului suatu orientasi obyek permasalahan, seperti dalam pembangunan desa yang dilaksanakan ini yang terlibat langsung adalah Kepala Desa/Kelurahan beserta pengurus LKMD dan kepala lingkungan, tetapi disamping itu yang memegang peranan penting adalah Pemimpin Informal karena terwujudnya suatu pembangunan tentu tidak terlepas dari adanya keterkaitan yang terpadu dari pemimpin informal dengan aparat pemerintah, karena dengan hal ini memungkinkan apa yang direncanakan tentu dapat dilaksanakan, karena tidak dapat disangkal bahwa salah satu fungsi dari pemimpin antara lain harus bersifat hakiki yakni berkomunikasi secara efektif antara pihak-pihak yang berhubungan.

Maka dalam hal ini kebijaksanaan pemerintah terhadap Pemimpin Informal dalam pembangunan desa sangatlah diperlukan untuk mencapai suatu keberhasilan, karena pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan senantiasa mengembangkan serta mengantisipasi swadaya gotong royong dari masyarakat, dan pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam secara optimal dalam rangka pencapaian pembangunan yang lebih mantap untuk dirasakan oleh semua pihak.

Kebijaksanaan pemerintah dalam mengantisipasi para Pemimpin Informal tentunya tidak henti-hentinya dan senantiasa memberikan motifasi serta pendekatan kepada tokoh masyarakat, sehingga mereka dapat merasa bertanggung jawab serta merasa memiliki pembangunan tersebut.

Pemerintah dalam hal ini senantiasa diharapkan sebagai motor penggerak terhadap pembanguan desa yaitu karena dalam hal ini memungkinkan apa yang akan direncanakan maupun dilaksanakan dapat tercipta dengan adanya hubungan yang baik dan komunikasi secara aktif antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Adapun kebijaksanaan pemerintah dalam mengantisipasi Pemimpin Informal menurut hasil wawancara adalah memberikan ceramah-ceramah dan penyuluhan dari pada manfaat pembangunan desa serta mengadakan musyawarah untuk mufakat.

Oleh karena itu peranan yang dimainkan oleh Pemimpin Informal sangat menentukan sekali berhasil tidaknya suatu pembangunan yang dilaksanakan, karena keberhasilan pemerintah itu pada dasarnya diukur dari peranannya yang dibebankan kepadanya dalam melaksanakan pembangunan, karena apabila seorang menerima tugas kepemimpinan dia harus memikul tanggung jawab bagi setiap tingkah lakunya sehubungan dengan tugas-tugas dan peranan yang harus dilakukannya. Menerima tugas tanggung jawab kepemimpinan mengandung resiko tertentu bila dia tidak mampu mencapai hasil yang diharapkan, kebanyakan pemimpin merasakan bahwa peranan sebagai pemimpin itu mengandung banyak tekanan dan tuntutan, terutama penggunaan waktu, usaha dan pengetahuan serta pengalaman yang dilakukan dalam melaksanakan tugas-tugas secara efektif, karena peranan pemimpin itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang dia harus selalu berfungsi sebagai pengayom, pendorong serta pembangkit semangat atau memberi motivasi dan contoh dalam keikutsertaanya dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Maka dalam hal ini pemerintah harus memberikan suatu kebijaksanaan dan mengantisipasi para Pemimpin Informal dalam melaksanakan pembangunan dengan memotifasi dan memberikan wewenang dan kepercayaan sehingga Pemimpin Informal merasa memiliki tanggung jawab dalam dirinya dan dapat mempengaruhi para masyarakat untuk bekerja sama dan melaksanakan pembangunan desa, dimana sebagai seorang

Pemimpin Informal harus mempunyai pendirian dan prinsip ditengah-tengah masyarakat, bahwa bilamana meraka didepan maka dia harus menjadi tauladan atau panutan kepada yang dipimpinnya atau disebut Hing Ngarso Sung Tolodho, dan bilamana dia berada di tengah harus memberikan semangat membangun pada masyarakat yang ada disekitarnya atau disebut Hing Madya Mangun Karsa, dan apabila dia berada dibelakang maka dia harus memberikan dorongan atau motivasi kepada masyarakat yang biasa disebut Tut Wuri Handayani.

Karena terwujudnya suatu pembangunan desa baik dari perencanaan sampai pelaksanaannya tentunya tidak terlepas pula dari adanya keterkaitan yang terpadu dari Pemimpin Formal dengan Pemimpin Informal serta masyarakat disekitarnya cukup berat, maka diharapkan agar orang-orang yang diserahi tanggung jawab kepemimpinan itu benar-benar mengerti peranannya dan mau meneriam tanggung jawab.

Bertitik tolak dari hal tersebut, sebagai Pemimpin Informal ditengah-tengah masyarakat harus pandai membaca situasi dalam masyarakat dan mempunyai banyak pengalaman baik pengalaman sendiri maupun pengalaman dari orang lain, dimana hal ini mempunyai dua maksud yang sangat penting yaitu : Pertama dengan berusaha mendalami faktor-faktor penyebab keberhasilan, termasuk cara-cara yang digunakan dalam pemecahan masalah, menghilangkan ancaman dan gangguan serta menghilangkan rintangan dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi. Kedua, mengenali secara tetap faktor-

faktor penghalang yang mengakibatkan kurang keberhasilan atau bahkan mungkin kegagalan yang didapatkan.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kelurahan Sungguminasa.

Berbicara mengenai masalah faktor yang mempengaruhi tentang pelaksanaan pembangunan desa tentunya tidak terlepas dari faktor pendukung serta faktor penghambat, karena mustahil suatu kegiatan pembangunan mengalami suatu kemacetan sehingga yang terjadi adalah sebaliknya, maka dalam hal ini perlu diusahakan upaya penanggulangannya untuk mencapai sasaran pembangunan yang diharapkan sehingga akan tercipta wujud dari pembangunan tersebut, yakni berhasil guna dan berdaya guna.

Berikut ini akan diuraikan tentang faktor-faktor tersebut yaitu :

1. Faktor pendukung.

faktor pendukung ini lebih banyak melihat pada diri sang pemimpin sebagai suatu yang memberi kemudahan dalam proses pelaksanaan pembangunan antara lain :

- a. Bahwa Kelurahan Sungguminasa adalah daerah yang sangat strategis letaknya yang mana hal ini mudah untuk dijangkau, dan itu merupakan modal utama untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan desa.
- b. Faktor manusianya, dimana Kelurahan Sungguminasa memiliki atau kaya akan manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai tenaga dalam pembangunan serta untuk membantu

baik yang berupa spritual maupun materialnya.

- c. Masalah fasilitas yaitu cukup banyak sarana dan parasarana dari berbagai aspek kehidupan.
- d. Kekuasaan yang didasarkan atas legalitas hukum yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat sesuatu dalam pembangunan desa.
- e. Kewibawaan yang berdasarkan atas suatu kelebihan, keunggulan atau keutamaan sehingga orang-orang yang dipimpin patuh dan bersedia untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang tertentu.
- f. Kemampuan yaitu yang didasarkan atas kesanggupan keahlian dan kecakapan tertentu yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Dengan melihat beberapa faktor penduduk tersebut diatas maka faktor dari pemimpinlah yang sangat menentukan disamping faktor letak, jumlah penduduk serta sarana maupun prasarana.

2. Faktor penghambat.

Kalau faktor pendukung lebih banyak melakat pada diri sang pemimpin, maka faktor penghambat ini lebih banyak melihat pada orang-orang yang dipimpinya seperti :

a. Kematangan jiwa para masyarakat

Pembangunan desa kurang sukses dalam mencapai tujuannya karena orang-orang yang berperan didalam pembangunan tersebut kurang memiliki kematangan jiwa, hal ini dapat

dilihat seperti kurangnya inisiatif masyarakat untuk mengembangkan diri.

b. Tingkat kecakapan dan kemampuan masyarakat.

Hal ini sangat penting karena bagaimanapun keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemimpin Informal dalam menggerakkan masyarakat tanpa dibarengi dengan kecakapan dan kemampuan maka mustahil pembangunan akan dicapai.

c. Adanya konflik.

Masalah ini sering terjadi didalam masyarakat, hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan kepentingan diantara sesama masyarakat, baik itu konflik diantara masyarakat maupun masyarakat dengan aparat pemerintah.

D. Langkah-langkah dalam mengatasi hambatan.

Hambatan dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa merupakan suatu dilema bagi masyarakat, disinilah aparat pemerintah bagaimana cara mengatisipasi para Pemimpin Informal dalam mengatasi hambatan yang ada maka berikut ini penulis akan menjelaskan langkah-langkah dalam mengatasi hambatan tersebut yang berupa :

1. Kematangan jiwa masyarakat.

Dalam mengatasi hal ini pemerintah dan Pemimpin Informal diharapkan lebih banyak memberikan motifasi dan menimbulkan semangat jaung masyarakat dan disamping itu juga perlu mengembangkan inisiatif dalam mengembangkan kreatifitas pribadinya.

2. Tingkat kecakapan bawahan.

Untuk mengatasi masalah ini maka pemerintah perlu memikirkan dan memberikan bimbingan serta arahan kepada masyarakat, sehingga mereka akan memiliki kemampuan dan semangat dalam melaksanakan pembangunan desa di Kelurahan Sungguminasa.

3. Adanya konflik.

Dalam mengatasi hal ini maka ini sifat dari pemimpin adalah dengan jalan musyawarah untuk mufakat dengan jalan mengembangkan kepemimpinan yang tradisional, pendekatan pemimpin yang netral serta pendekatan pemimpin yang moderen atau interaksionistis dengan melihat situasi serta kondisi kultural masyarakat, sehingga dengan jalan tersebut konflik yang ada dapat segera teratasi dan tidak menghambat terwujudnya pembangunan yang sedang digalakkan.

BAB V

PENUTUP

A. Dari uraian terdahulu, maka penulis akan menyimpulkan beberapa hal yang menyangkut tentang Peranan Pemimpin Informal Dalam Pembangunan Desa di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Daerah Tingkat II Gowa yakni :

1. Untuk mencapai suatu kepemimpinan yang baik maka pemimpin itu harus mempunyai suatu kriteria dan mampu memikat serta mempengaruhi orang-orang dalam meningkatkan peranannya atau aktifitasnya untuk berkarya dalam berbagai bidang pembangunan.
2. Keterlibatan serta keberadaan apara Pemimpin Informal dan partisipasi warga masyarakat Kelurahan Sungguminasa baik berupa material maupun spiritual sangat besar manfaatnya dalam menunjang proses pelaksanaan pembangunan. Begitu pula adanya kerja sama yang saling berkaitan antara pihak pemerintah dengan Pemimpin Informal dalam membahas pelaksanaan pembangunan.
3. Faktor Geografis dari Kelurahan Sungguminasa sangatlah strategis serta kekayaan alamnya yang akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh baik dari pemerintah maupun para Pemimpin Informal memakai suatu program pemerintah yang terpadu, menyeluruh yaitu suatu sistim Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) dimana dalam sistim ini untuk mempercepat suatu proses

dan laju pembangunan pedesaan diberbagai bidang.

5. Dalam mengantisipasi para Pemimpin Informal maka pemerintah memberikan suatu kebijaksanaan dan mengatasi faktor-faktor penghambat dari pada pelaksanaan pembangunan.

B. Saran-saran.

Dari beberapa kesimpulan yang ada serta dari uraian terdahulu maka penulis akan memberikan beberapa saran atau pendapat yang ditujukan baik kepada Pemerintah, Pemimpin Informal maupun Masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk lebih mawas diri atau lebih mengetahui sertya mendalami akan makna dan arti dari pembangunan yang berupa antara lain :

1. Agar hendaknya pihak pemerintah selalu senantiasa memperhatikan serta berperan aktif untuk mengajak para Pemimpin Informal agar lebuah giat berperan dalam mensukseskan pembangunan.
2. Agar dalam membawa perencanaan pembangunan di Kelurahan Sungguminasa, pihak pemerintah selalu mengikutsertakan para Pemimpin Informal, karena hal ini dikandung maksud agar para Pemimpin Informal dapat memberikan sumbangsih atau pemikiran serta ide-ide dalam memecahkan sesuatu persoalan yang menyangkut pembangunan didaerahnya karena dengan keikutsertaan para Pemimpin Informal maka apa yang diharapkan oleh pemerintah dapat tercapai, karena Pemimpin Informallah yang mengetahui akan kehendak hati nurani seluruh warga di Kelurahan Sungguminasa.

3. Agar hendaknya para Pemimpin Informal tidak segan-segan untuk mengungkapkan sesuatu dalam membahas tentang pelaksanaan pembangunan, karena dengan jalan keterbukaannya itulah maka pemimpin (pemerintah) tahu dengan pasti apa yang diharapkan dari warga masyarakatnya sehingga sedini mungkin gejala-gejala negatif yang akan muncul dapat segera diantisipasi.
4. Agar hendaknya warga masyarakat senantiasa sadar akan kepentingan pembangunan di Kelurahan Sungguminasa, sebab dengan adanya kesadaran serta kerelaannya untuk menyumbangkan baik moral maupun spiritual maka pelaksanaan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan berjalan sukses serta berdaya guna buat kepentingan semua warga masyarakat di Kelurahan Sungguminasa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

- Bintarto R, Prof. Drs; Enteraksi Desa-Kota dan permasalahannya. halia Indonesia, Jakarta. 1984.
- Bintarto, Tjokroamijojo, Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta LP3ES Cetakan I, 1974.
- Teori dan Strategi Pembangunan Nasional. Gunung Agung Jakarta, 1984.
- Karijadi, M. Kepemimpinan (Leadership). Politeu Bogor. 1977.
- Kartodirjo, Sartono, Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial. LP3ES, Jakarta. 1986.
- Kartono, Kartini, Drs; Pemimpin Dan Kepemimpinan. CV Raja wali Jakarta.
- Marfat, Prof. Dr; Pemimpin Dan Kepemimpinan. Ghalia Indonesia Jakarta. 1985.
- Mubyarto, Prof. Dr; Pembangunan Pedesaan Di Indonesia. Liberty Yogyakarta. 1985.
- Pamuji, S, Drs, MPA; Kepentingan Pemerintahan Di Indonesia. PT.Gunung Agung, Jakarta, Jakarta. 1983.
- Sondang P. Siagian, Prof. Dr. MPA; Teori Dan Praktek Kepemimpinan PT. Dina Aksara, Jakarta. 1988.
- Sondang P., Siagian, Prof. Dr. MPA; Administrasi Pembangunan. CV. Haji Masagung.
- Singarimbun, Masrie dan Sofyan Effendi. (Penyunting). Metode Penelitian Survey. LP3ES Jakarta. 1984.
- Lain-lain
- Presiden Republik Indonesia. Pidato Kenegaraan Presiden

Republik Indonesia. Tanggal 16 Agustus 1987.

Undang-undang Dasar 1945, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). GBHN 1987.

Team Pembinaan Penataran.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975. Tentang Pokok-pokok Pemerintah di Indonesia. Aneka Ilmu Semarang 1987.

Undang-undang nomor 5 Tahun 1975. Tentang Pemerintahan Desa. Ghalia Indonesia, Jakarta 1980



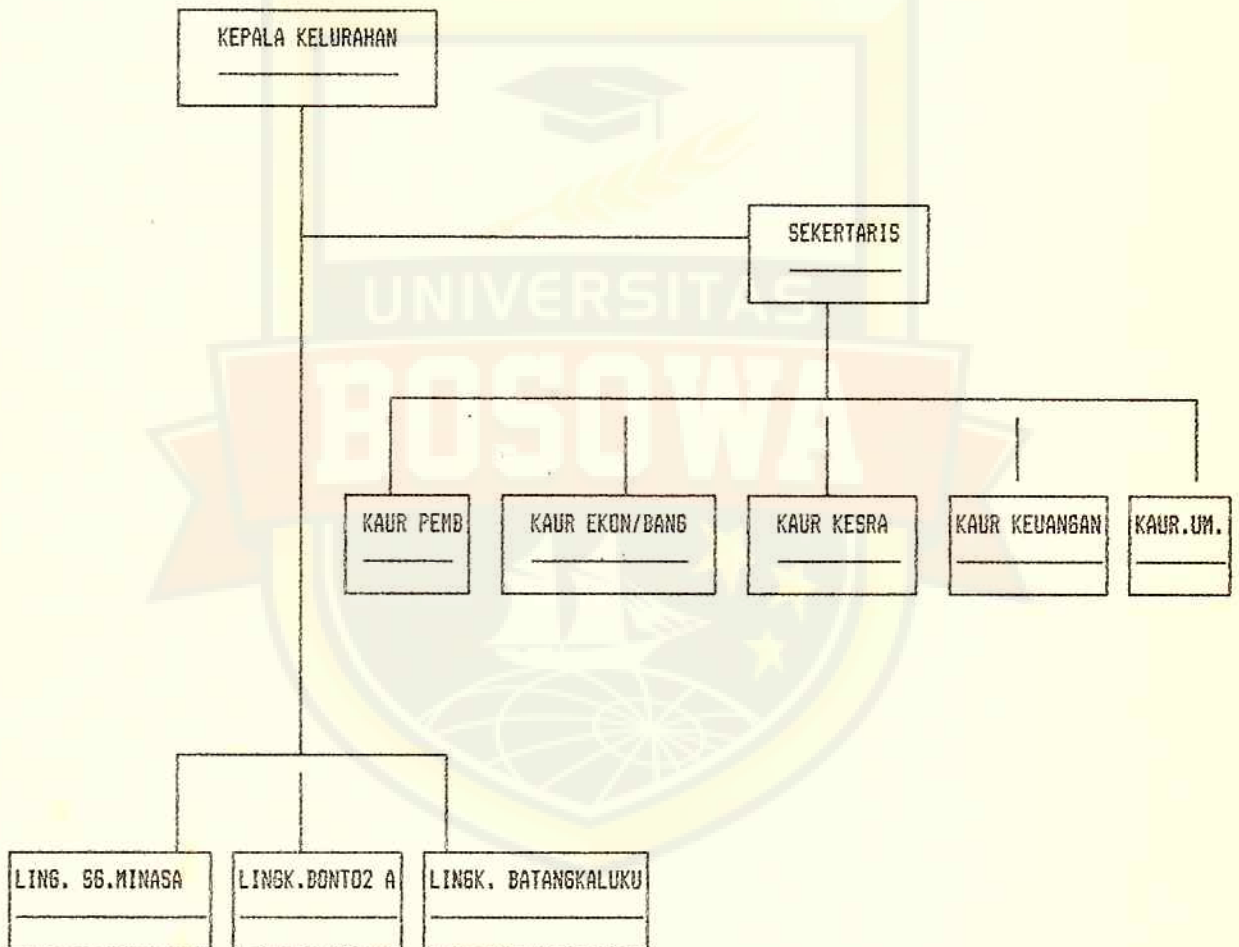
DAFTAR KUTIPAN

1. Dra Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan Jakarta CV Rajawali 1906 hal 15.
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 1969.
3. DR.SP. Siagian MPA, Methodologi.
4. Dra. Kartini Kartono, hal 33
5. Prof. Drs. S Pamuji, MPA Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia Jakarta PT Bina Aksara 1983 hal 5.
6. Dra. Kartini dan Kartono, hal 39
7. Ibid hal 40
8. M. Karjadi Kepemimpinan (Leadership) Bogor Politea 1977.
9. Hal 6
9. Prof. Dr. Sondang P Siagian MPA, Administrai Pembangunan Jakarta PT Gunung Agung Cetakan X 1983 hal 33
10. Bintoro Tjokroamidjojo Pengantar Administrasi Pembangunan Jakarta LP3S Cetakan I 1974 hal 22.
11. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
12. Prof.Dr.R. Bintoro Interaksi Desa - Kota dan Permasalahannya Ghalia Indonesia hal 13.
13. Undang-undang No. 5 Tahun 1979.
14. Presiden RI Pidato Kenegaraan Presiden Tanggal 16 Agustus 1987 Jakarta.
15. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENDAGRI

Nb. 44 TAHUN 1980.

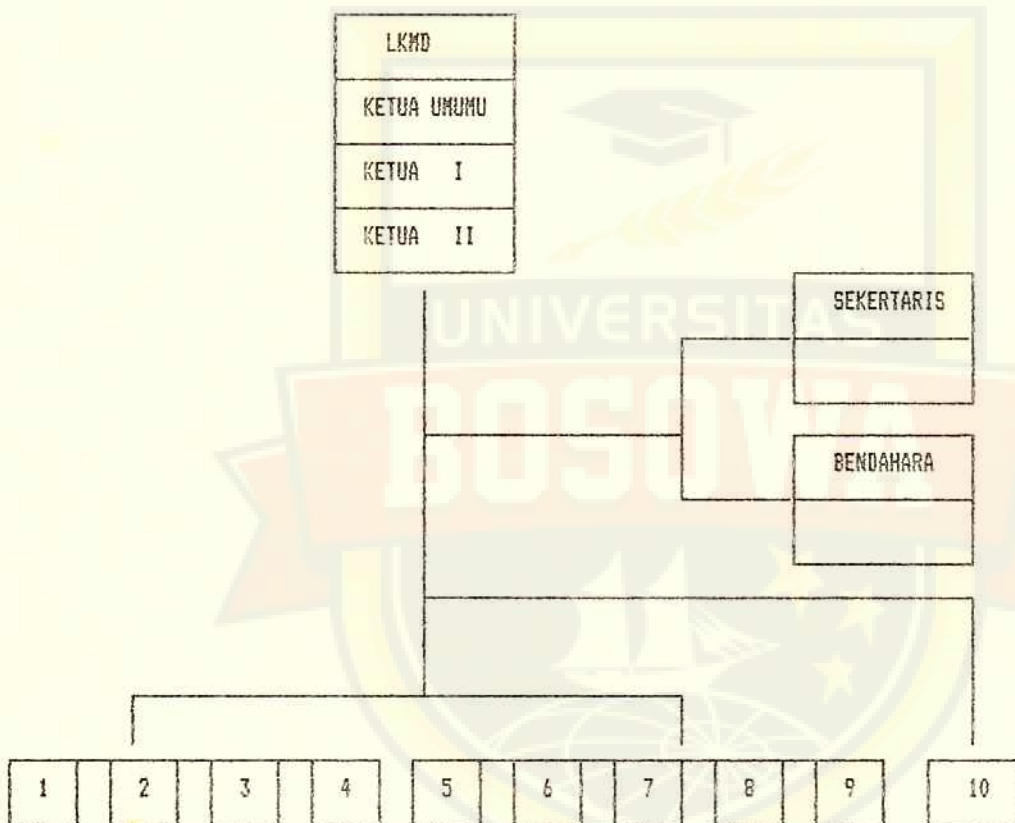
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN SUNGGUMINASA



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENDAGRI

No. 27 TAHUN 1984 TANGGAL 4-4-198

STRUKTUR ORGANISASI LKMD



DI KOORDINASIKAN OLEM

DI KOORDINASIKAN OLEM		
KETUA UMUM	KETUA SATU	KETUA DUA
1. SEKSI ASAMA	5. SEKSI LINGKUNGAN HIDUP	10. PKK
2. SEKSI P4	6. SEKSI PEMB. PEREKONOMIAN	
3. SEKSI KANTIBMAS	7. SEKSI KES, PENDUDUK, KD	
4. SEKSI PENDIDIKAN DAN PENERANGAN	8. SEKSI PEMUDA DAN ORKES	
	9. SEKSI KESEJAHTERAAN SOS.	